

**SKRIPSI**

**EFEKTIFITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA  
UNTUK PEMBANGUNAN FISIK KOTA SABANG  
(Studi Pada Desa Aneuk Laot Kecamatan Sukakarya)**



**Disusun Oleh:**

**MAULIDYA CAISARINA  
NIM. 180604082**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M / 1444 H**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Maulidya Caisarina  
NIM : 180604082  
Program Studi : Ilmu Ekonomi  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Januari 2023

Yang Menyatakan



*Maulidya Caisarina*  
Maulidya Caisarina

## PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

### **Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk Pembangunan Fisik Kota Sabang (studi pada desa Aneuk Laot Kecamatan Sukakarya)**

Disusun Oleh:

Maulidya Caisarina

NIM: 180604082

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

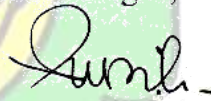
Pembimbing I,



Dr. Halas Furqani, M.Ec

NIP. 198006252009011009

Pembimbing II,

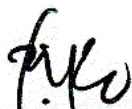


Jalilah, S.HI., M.Ag

NIDN. 2008068803

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi,



Cut Qian Fitri, SE., M.Si, Ak.

NIP: 198307092014032002

**PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk  
Pembangunan Fisik Kota Sabang  
(Studi Pada Desa Aneuk Laot Kecamatan Sukakarya)**

Maulidya Caisarina

NIM: 180604082

Telah Disidangkan Oleh Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan  
Program Studi Strata 1 dalam bidang Ilmu Ekonomi

Pada Hari/Tanggal : Rabu 28 Desember 2022  
04 Jumadil Akhir 1444 H

Banda Aceh  
Tim Penguji Sidang Skripsi

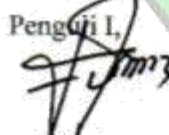
Ketua  


Dr. Hafas Furqani, M.Ec  
NIP: 198006252009011009

Sekretaris,



Jalilah, S.HI., M.Ag  
NIDN. 2008068803

Penguji I,  


Dr. Fithriady, Lc., MA  
NIP. 198008122006041004


Penguji II,



Cut Elfida, S.HI., M.A  
NIDN. 2012128901

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
Dr. Hafas Furqani, M.Ec.  
NIP: 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Maulidya Caisarina  
NIM : 180604082  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ilmu Ekonomi  
E-mail : [180604082@student.ar-raniry.ac.id](mailto:180604082@student.ar-raniry.ac.id)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  KKU  Skripsi .....

yang berjudul:

**Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Pembangunan Fisik Kota Sabang. (Studi Pada Desa Aneuk Laot Kecamatan Sukakarya)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya,

Dibuat di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 15 Januari 2023

Penulis,

Maulidya Caisarina  
NIM. 180604082

Mengetahui,

Pembimbing I,

Dr. H. Mas Furgani, M.Ec  
NIP: 18006252009011009

Pembimbing II,

Jalilah, S.H.L., M.Ag  
NIDN. 2008068803

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya serta shalawat serta salam selalu kita panjatkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul penelitian **“Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Pembangunan Fisik Kota Sabang (studi kasus desa Aneuk Laot Kecamatan Sukakarya)”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program Strata-1 pada jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Dalam rangka penyusunan skripsi ini, terutama kepada yang terhormat:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Cut Dian Fitri, SE., M.Si, Ak selaku Ketua Prodi Program Studi Ilmu Ekonomi dan Ana Fitriah, SE., M.Sc selaku sekretaris program studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

3. Hafizh Maulana, S.p., S.HI., M.E selaku ketua labotarium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Dr. Hafas Furqani, M.Ec, selaku dosen pembimbing I dan Jalilah, S.HI.,M.Ag selaku pembimbing II yang kesabarannya dan juga begitu banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis sehingga skripsi ini terselesaikan.
5. Dr. Fithriady, Lc., MA selaku dosen penguji I dan Cut Elfida, S.HI.,MA selaku dosen penguji II yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada sidang munaqasyah skripsi.
6. A. Rahmat Adi, SE., M.SE, selaku dosen pembimbing akademik.
7. Segenap dosen jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Ar-Raniry Banda Aceh yang mana telah memberikan ilmunya kepada saya.
8. Terima kasih kepada Orang tua tercinta, ayahanda Burhanuddin dan ibunda Yusmarita Bangun, dan kakak Ulfah Ramadhanti atas doa, bimbingan, serta kasih sayang yang selalu tercurah selama ini.
9. Terim kasih juga kepada teman-teman, sahabat dan kerabat terdekat yang telah memberikan dukungan untuk penulis dalam hal menyusun dari proposal skripsi hingga skripsi.
10. Semua pihak yang telah mendukung penulisan skripsi ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmad-Nya dan membalas semua amal kebaikan mereka, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena terbatasnya kemampuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, segala kritik dan saran akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Banda Aceh,  
Penulis



Maulidya Caesarina



## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 –Nomor:0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak Dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	ح	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

### 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Faṭḥah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Faṭḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. *Maddah*

*Maddah* atau panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
يَ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutoh* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutoh ada dua.

- a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-MadīnatulMunawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

#### Catatan:

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Maulidya caisarina  
NIM : 180604082  
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Illmu ekonomi  
Judul : Efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan fisik kota Sabang (studi kasus pada Desa Aneuk Laot Kecamatan Sukakarya).  
Pembimbing I : Dr. Hafas Furqani M.Ec  
Pembimbing II : Jalilah, S.HI.M.Ag

Salah satu persoalan mendasar dalam pembangunan pedesaan adalah infrastruktur dan untuk menyelesaikan masalah ini salah satu caranya dengan mengalokasikan ADD untuk pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan, dan efektifitas dalam pengelolaan ADD untuk pembangunan fisik Kota Sabang. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data penelitian ini dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalokasian dana desa untuk pembangunan fisik Kota Sabang diperuntukkan salah satunya untuk pembangunan infrastruktur. Melihat dari indikator efektifitas dapat dikatakan efektif karena sudah mencapai tujuan, tepat waktu dan sesuai manfaat.

***Kata kunci : Dana Desa, efektifitas, pembangunan fisik.***

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian .....	11
1.4. Manfaat Penelitian .....	11
1.5. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II     LANDASAN TEORI .....</b>	<b>14</b>
2.1. Konsep Efektifitas .....	14
2.1.1. Definisi Efektifitas .....	14
2.1.2. Indikator Efektifitas .....	15
2.2. Dana Desa.....	17
2.2.1. Pengertian Dana Desa.....	17
2.2.2. Definisi Alokasi Dana Desa.....	18
2.2.3. Tujuan Alokasi Dana Desa .....	22
2.2.4. Pembangunan Fisik.....	25
2.3. Penelitian Terkait.....	29
2.4. Kerangka Berpikir .....	33

<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>36</b>
	3.1. Jenis Penelitian .....	36
	3.2. Informan Penelitian.....	36
	3.3. Jenis Dan Sumber Data.....	38
	3.4. Teknik Pengumpulan Data .....	39
	3.5. Teknik Analisis Data .....	40
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
	4.1. Sejarah kota Sabang dan Kondisi Geografis Desa Aneuk Laot .....	44
	4.2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk Pembangunan Fisik Kota Sabang (studi pada Desa Aneuk Laot kecamatan Sukakarya).....	51
	4.3. Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk Pembangunan Fisik Kota Sabang (studi pada Desa Aneuk Laot kecamatan Sukakarya).....	64
	4.4. Kendala yang menghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk Pembangunan Fisik Kota Sabang (studi pada Desa Aneuk Laot kecamatan Sukakarya) .....	83
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>92</b>
	5.1. Kesimpulan .....	92
	5.2. Saran .....	92
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>
	<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>97</b>
	<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>100</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Alokasi Dana Desa di Kota Sabang .....	6
Tabel 2.1. Penelitian Terkait .....	31
Tabel 3.1. Data Informan .....	37
Tabel 3.2. Data Informan berdasarkan usia .....	38
Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Menurut Jurong di Desa .....	51
Tabel 4.2. Jumlah Penduduk miskin di Desa Aneuk Laot.....	67



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1.	Bukti proyek pembangunan jalan di Desa Aneuk Laot.....	70
Gambar 4.2.	Bukti proyek pembangunan jalan di Desa Aneuk Laot.....	76





# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 latar Belakang**

Beberapa daerah di Indonesia memiliki otonomi daerah tersendiri, salah satunya provinsi Aceh. Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan undang-undang, yakni undang-undang nomor 22 tahun 1999. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan dayaguna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Pelaksanaan otonomi daerah telah berhasil membuat pembangunan di daerah menjadi lebih maju, lebih cepat berkembang dalam pembangunan daerah, peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Adanya otonomi daerah ini yang sebagaimana telah disahkan dalam Undang-Undang tentunya mendapat sambutan positif dari berbagai pihak. Adapun yang mengatur tentang otonomi daerah ini adalah UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang No. 33 tahun 2004 Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah. Sejak wacana itu ada, sudah memperoleh sambutan positif dari berbagai pihak serta harapan dengan adanya

otonomi daerah maka upaya untuk menghilangkan praktik-praktik sentralistik semakin kuat karena pada satu sisi akan dianggap kurang menguntungkan bagi daerah dan penduduk lokal. Otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, itu dapat diartikan daerah diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintahan pusat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Meskipun saat ini kebijakan yang ada masih berfokus otonomi pada tingkat kabupaten /kota, namun berdasarkan konsepnya sendiri sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan paling bawah, yaitu desa. (Nurlailah,dkk, 2019).

Desa sendiri merupakan bagian terkecil dari sebuah pemerintahan. Dimana keaslian desa terletak pada kewenangan otonomi dan tata pemerintahannya, yang diatur dan dikelola berdasarkan atas hak asal-usul dan adat istiadat setempat. Dengan demikian, pemerintah desa dipercaya lebih mampu melihat prioritas kebutuhan utama dari masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten /kota. Untuk itu, pembangunan pedesaan yang dilakukan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, aspirasi masyarakat, dan prioritas pembangunan pedesaan yang sudah ditetapkan. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah dalam pembangunan pedesaan adalah adanya anggaran dana pembangunan secara khusus yang telah di cantumkan dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD).

Dengan bergulirnya dana pembangunan melalui alokasi dana desa (ADD) harus menjadikan desa sejahtera. Untuk persoalan alokasi dana desa (ADD) meski sudah diwajibkan untuk dianggarkan dalam pos APBD, namun masih banyak daerah yang belum melakukannya. Hal ini berkaitan dengan kondisi perangkat desa yang dianggap masih rendah kualitas SDM-nya. Pengelolaan keuangan desa menjadi wewenang desa yang dijelaskan dalam peraturan desa (Perdes) tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APB desa) ([djbk.kemenkeu.id](http://djbk.kemenkeu.id)).

Pada tahun 2015 pemerintah memberikan Dana Desa sesuai dengan diterbitkannya UU No. 6/2014 tentang Dana Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 6/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Sebelum adanya anggaran Dana Desa, setiap desa sudah menerima Alokasi Dana Desa (ADD) namun jumlahnya tergolong kecil karena hitungan ADD didapat dari pembagian dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Maka dari itu, untuk pembangunan fisik tidak terlihat adanya perkembangan karena ADD juga dibagi untuk membiayai operasional, kegiatan fisik dan non fisik (Sulastri,dkk, 2016).

Menurut Menteri Keuangan pada tahun 2015 pemerintah mengucurkan dana desa yang sebesar Rp 20,7 triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada

tahun 2018 Pemerintahan mengucurkan dana desa hampir sebesar satu milyar rupiah untuk setiap desa, jumlah ini menunjukkan bahwa pemerintah menaikkan anggaran dana desa sebesar 37,47 persen dari tahun 2015. Artinya, penyaluran dana desa dari pemerintah memberikan dampak positif bagi perdesaan. Dana Desa terbukti telah menghasilkan sarana/prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat desa, antara lain berupa pembangunan infrastruktur di perdesaan seperti jalan desa, jembatan, saluran air bersih dan lain-lain (Nota keuangan dan LKPP).

Salah satu persoalan mendasar dalam masalah pembangunan pedesaan adalah masalah infrastruktur yang dimana sedang menjadi pusat perhatian pemerintah daerah. Oleh karena itu, untuk mengetahui keberhasilan suatu pemerintahan agar kabupaten tersebut maju dan terdepan yaitu dengan cara pembangunan merata yang didasari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan transparansi di setiap desa yang masih berkembang. Selain itu dengan adanya dana desa juga akan memberikan dampak positif dalam pembangunan ekonomi. Aceh juga merupakan salah satu daerah yang mendapat otonomi khusus, termasuk dalam hal pengelolaan dana desa. Dimana dana desa di Aceh ini diperuntukkan juga untuk perkembangan daerah-daerah di Aceh, salah satunya di wilayah Kota Sabang. Kota Sabang sendiri menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian khusus karena merupakan salah satu objek wisata di provinsi Aceh. Dalam hal ini, Alokasi Dana Desa di Kota Sabang itu sendiri dialokasikan untuk

beberapa sektor oleh pemerintah seperti pembangunan fisik, sektor pertanian, kesehatan, dan lainnya. Kota Sabang sendiri memiliki beberapa desa, dimana Alokasi Dana Desanya itu diperuntukkan setiap desanya disesuaikan dengan kebutuhan setiap desa. Adapun desa yang menjadi titik fokus peneliti adalah Desa Aneuk Laot, dimana pihak pemerintah desa ini sudah mengoptimalkan pengelolaan alokasi dana desa khususnya pada pembangunan fisik. Sepanjang tahun 2020 hingga 2021 ada beberapa pembangunan yang diprioritaskan untuk segera dilakukan oleh pihak pemerintah Desa Aneuk Laot seperti, membuat saluran pembuangan air/got, pembuatan kamar mandi di rumah warga, dan pembuatan jalan paving blok.

Pada tahun 2020 pemerintah Kota Sabang mendapatkan Alokasi Dana Desa sebesar Rp 25,1 miliar dan pada tahun 2021 Alokasi Dana Desa sebesar Rp 26,7 miliar untuk 18 gampong dalam 3 kecamatan di pulau paling barat Indonesia itu yakni Kecamatan Sukakarya, Sukajaya dan Sukamakmue (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh). Dengan pernyataan di atas terlihat jelas bahwa dari tahun 2020 dan 2021 Alokasi Dana Desa yang didapatkan pemerintah Kota Sabang mengalami kenaikan.

Setiap kecamatan di Kota Sabang terdiri dari beberapa jumlah desa yang berbeda. Kecamatan Sukakarya terdiri dari 5 desa, yaitu Desa Aneuk Laot, Krueng Raya, Kuta Ateuh, Kuta Barat, dan Kuta Timu. Selanjutnya kecamatan Sukajaya terdiri dari 7 desa,

yaitu Anoi Itam, Cot Abeuk, Balohan, Cot Bak U, Ie Meulee, Jaboi, dan Ujong Kareung. Yang terakhir adalah kecamatan terbaru di kota sabang yang dibentuk pada februari 2021 yang terdiri dari 6 desa di dalamnya yaitu desa Batee Shok, Beurawang, Iboih, Keunekai, Paya, dan Paya Seunara. Untuk melihat lebih jelas jmlah Alokasi Dana Desa pada setiap desa yang ada di Kota Sabang, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Alokasi Dana Desa di Kota Sabang**

<b>NO</b>	<b>Desa</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
1	Aneuk Laot	1.258.657.000	1.208.551.000
2	Krueng Raya	1.413.570.000	1.542.157.000
3	Kuta Ateuh	1.100.469.000	1.154.459.000
4	Kuta Barat	1.833.507.000	1.801.422.000
5	Kuta Timu	1.289.380.000	1.341.693.000
6	Anoe Itam	1.267.246.000	1.325.549.000
7	Balohan	2.273.549.000	2.277.283.000
8	Cot Abeuk	1.239.927.000	1.322.388.000
9	Cot Bak U	1.586.026.000	1.776.652.000
10	Ie meulee	1.260.676.000	1.263.930.000
11	Jaboi	1.451.209.000	1.432.192.000
12	Ujong Kareung	959.540.000	991.529.000
13	Batee shok	1.827.307.000	2.301.704.000
14	Beurawang	1.365.502.000	1.460.166.000
15	Iboih	1.517.772.000	1.834.332.000
16	Keunekai	976.367.000	1.051.683.000
17	Paya	1.202.326.000	1.293.884.000
18	Paya Seunara	1.333.271.000	1.418.453.000

Sumber: DPMG Aceh

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah Alokasi Dana Desa di setiap desa berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena kebutuhan pada setiap desa juga berbeda, dimana ada beberapa desa yang merupakan desa wisata maka mendapat Alokasi Dana Desa yang cukup besar seperti Iboih dan Aneuk Laot. Dalam hal ini, peneliti memfokuskan pada salah satu desa yang mendapatkan Alokasi Dana Desa yaitu Desa Aneuk Laot, karena Desa Aneuk Laot merupakan salah satu desa wisata yang menarik dan juga ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Salah satu objek wisata yang terdapat di Desa Aneuk Laot adalah Danau. Dimana, danau tersebut merupakan satu-satunya danau yang ada di Kota Sabang. Hal itu pula yang menjadikan peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Aneuk Laot. Sebagai desa wisata jika dibandingkan dengan desa iboih, Desa Aneuk Laot memiliki daya tarik tersendiri akan objek wisata yang ditonjolkan yaitu danau. Melihat Kota Sabang adalah pulau yang dikelilingi oleh lautan luas dan alam bawah laut yang indah. Hal itu sudah sering dilihat di desa Iboih dan pantai lain yang ada di Kota Sabang seperti pada Desa Anoe Itam. Dalam hal penyaluran dana, dana desa yang disalurkan kepada Desa Aneuk Laot juga diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur desa.

Adapun berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak RZ selaku bendahara keuangan di kantor Desa Aneuk Laot, Desa Aneuk Laot sendiri memiliki ADD sebesar 1,2 miliar yang

digunakan untuk pembangunan desa. Aneuk Laot merupakan desa wisata yang berbasis budaya di Kota Sabang. Namun jumlah Alokasi Dana Desa dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami penurunan, salah satu penyebabnya adalah wabah covid yang menjadikan beberapa perencanaan pembangunan di tahun sebelumnya tidak terlaksana maka jumlah Alokasi Dana Desa untuk tahun berikutnya mengalami penurunan.

Desa Aneuk laot memiliki beraneka ragam budaya yang masih terpelihara saat ini. Desa yang memiliki Danau terbesar di Kota Sabang membuat suasana makin sejuk dan asri yang dikelilingi oleh hutan lindung. Sebagai objek wisata, desa ini menjadi salah satu tempat yang paling diminati untuk dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Banyaknya wisatawan yang berkunjung juga menjadi salah satu perhatian dari pemerintah desa agar selalu dapat mengoptimalkan pembangunan desa Aneuk Laot sebagai desa wisata khususnya dalam hal infrastruktur untuk wisata seperti menambah fasilitas rekreasi disekitar Danau. Pemerintah desa juga telah mengalokasikan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dengan baik maka dari itu hingga saat ini kunjungan wisatawan meningkat (Kadis Pariwisata Kota Sabang).

Namun dalam hal ini, peneliti hanya memfokuskan Alokasi dana Desa untuk infrastruktur. Penulis memiliki alasan tersendiri dalam memilih program Alokasi dana desa dibandingkan dengan program pemerintah yang lainnya. Hal ini dikarenakan alokasi dana



desa memiliki pengaruh yang besar terhadap pembangunan sebuah desa di setiap kabupaten /kota yang ada di Indonesia. Alokasi dana desa sepenuhnya dikendalikan dan diawasi oleh pemerintah dan masyarakat yang ada di desa. Oleh karena itu, penulis lebih memilih topik tentang alokasi dana desa karena jika dana ini dikelola dengan jujur maka hasil pembangunan pun akan terlihat dengan jelas. Hal ini juga senada dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Noviyanti dkk (2017) yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Lakapodo berjalan dengan baik, akan tetapi walaupun proses pembagunan berjalan dengan baik namun tahapan pelaksanaan ini harus melibatkan masyarakat sebagai tim evaluasi atau tim pengawas dari setiap kegiatan yang di adakan oleh pemerintah desa. Hal tersebut terjadi karena belum ada transparansi atau keterbukaa oleh Pemerintah Desa sebagai Pengelola Alokasi Dana Desa kepada masyarakat dalam bentuk informasi penggunaan dana Alokasi Dana Desa.

Hasil akhir yang diharapkan dengan adanya alokasi dana desa adalah terciptanya pembangunan diberbagai aspek, baik itu pembangunan fisik maupun pembangunan non-fisik. Pembangunan fisik berupa pembangunan fasilitas untuk masyarakat desa seperti tempat ibadah, puskesmas, dan sebagainya. Adapun pembangunan non-fisik dapat berupa pembekalan sumber daya manusia untuk masyarakat desa seperti keterampilan jahit menjahit, karang taruna dan sebagainya.

Dalam memanfaatkan dan mengelola dana desa dibutuhkan kemampuan organisasi dan infrastruktur desa yang kuat. Semua itu dibutuhkan agar desa tidak terus tertinggal dan dapat berkembang. Hal ini sangat berpengaruh besar bagi masyarakat dalam menumbuhkan lingkungan ekonomi yang baik dan juga meningkatkan kesejahteraan hidup.

Berdasarkan pertimbangan dan kenyataan di atas, diharapkan keseluruhan Pemerintah desa dapat mengoptimalkan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang dimiliki sehingga penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini dapat menggerakkan roda perekonomian desa, maka pembangunan desa akan semakin meningkat. Pembangunan yang meningkat ini diharapkan akan mengurangi disparitas pertumbuhan antar desa. Berdasarkan latar belakang diatas, maka judul penelitian ini yaitu: **“Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Fisik kota Sabang”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang judul di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kota Sabang dalam Pembangunan Fisik kota Sabang?
2. Bagaimana efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Kota Sabang?

3. Bagaimana kendala pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik Kota Sabang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik kota Sabang.
2. Untuk mengetahui Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik kota Sabang.
3. Untuk mengetahui kendala apa saja yang menghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik kota Sabang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu:

1. Manfaat teoritis:  
Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk peneliti selanjutnya dan dapat dijadikan sebagai bacaan untuk khazanah keilmuan tertentu.
2. Manfaat praktisi:  
Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk masyarakat terutama masyarakat gampong Aneuk Laot dalam mengelola Dana Desa untuk meningkatkan pembangunan.

3. Manfaat Akademis, merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi program sarjana strata 1 (S1) pada program studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian tentang efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa ini akan dibagi dalam lima bab yaitu:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Merupakan bab pembukaan dalam skripsi yang berisikan tentang latar belakang pemilihan judul penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Merupakan uraian mengenai deskripsi teori, penelitian terkait dan kerangka berpikir dengan tema skripsi yang akan di teliti dan hipotesis.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

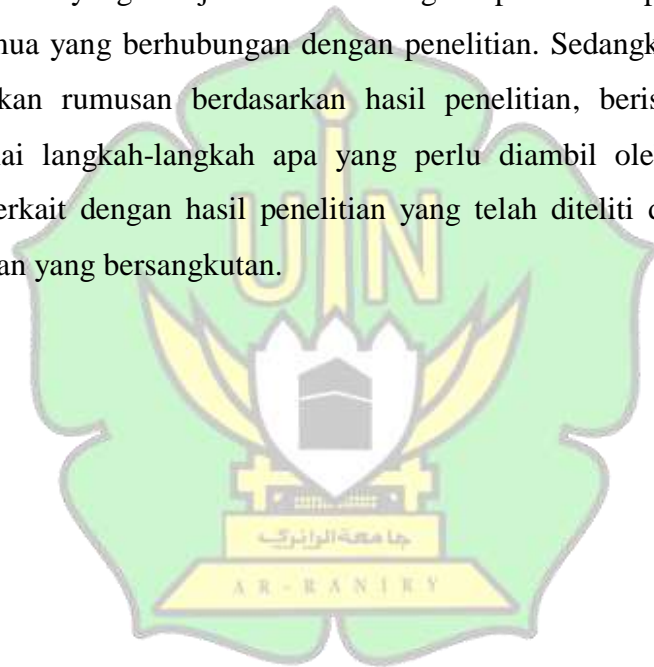
Membuat secara rinci metode penelitian yang akan digunakan peneliti beserta jenis penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan uji keabsahan data yang digunakan.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Memuat hasil penelitian klasifikasi pembahasan sesuai dengan pendekatan, sifat penelitian dan rumusan masalah atau pada penelitian.

## **BAB V PENUTUP**

Bab terakhir ini memuat kesimpulan dan juga beserta saran. Kesimpulan yang disajikan secara ringkas penemuan penelitian dan semua yang berhubungan dengan penelitian. Sedangkan saran merupakan rumusan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang telah diteliti dan hasil penelitian yang bersangkutan.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Konsep Efektivitas**

##### 2.1.1 Definisi Efektivitas

Pada dasarnya pengertian efektifitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan seberapa jauh suatu target yang telah dicapai oleh manajemen seperti kualitas, kuantitas, dan waktu, dimana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Semakin banyak suatu target yang dapat dicapai maka akan semakin efektif pula kegiatan tersebut. Kata efektifitas juga dapat diartikan sebagai usaha tertentu atau suatu tingkat keberhasilan yang dapat dicapai oleh seseorang atau suatu perusahaan.

Menurut Kurniawan (2008), efektifitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Sementara Effendy (2003) menyebutkan bahwa efektifitas adalah komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan

Tingkat efektifitas dapat dilihat dan dinilai dari hasil yang telah dicapai. apabila output atau hasil yang dicapai sesuai atau mencapai target sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, maka hal itu dapat dikatakan efektif. Namun sebaliknya dapat dikatakan

tidak efektif apabila hasil yang didapat tidak sesuai dengan target sasaran yang telah ditentukan. Untuk itu diperlukan suatu ukuran atau indikator untuk melihat tingkat efektivitas.

Efektivitas pada umumnya sering dihubungkan dengan efisiensi dalam pencapaian tujuan baik tujuan individu, kelompok dan organisasi. Menurut Hidayat (1986) Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Selanjutnya Effendy mengemukakan Efektivitas adalah indikator dalam tercapainya sasaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya sebagai sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Gibson menyatakan beberapa kriteria ukuran efektivitas yang meliputi: hasil produksi, efisiensi, kepuasan, penyesuaian, dan kelangsungan selanjutnya.

### **2.1.2 Indikator Efektivitas**

Menurut pendapat Nurhayati (2017) mengungkapkan ada 4 indikator dalam efektivitas. Ia mengatakan indikator efektivitas sebagai berikut :

- a. Pencapaian Tujuan : penggunaan dana desa dapat dikatakan efektif apabila penggunaannya sesuai dengan prioritas kebutuhan sehingga tujuan yang direncanakan dapat tercapai.

- b. Ketepatan waktu : proses penyaluran dan penggunaan dana sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan hingga berakhirnya kegiatan.
- c. Sesuai manfaat : dana desa dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa sebagai penerima program dana desa.
- d. Hasil sesuai dengan harapan masyarakat.

Menurut pendapat David Krech, Richard S. Cruthfied dan Egerton L. Ballachey (2012 : 119– 120) menyebutkan indikator efektivitas sebagai berikut :

1. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan Hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan (ratio) antara masukan (input) dengan keluaran (output), usaha dengan hasil, persentase pencapaian program kerja dan sebagainya.
2. Tingkat kepuasan yang diperoleh Ukuran dalam efektivitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pada jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada mutu).
3. Produk kreatif Penciptaan hubungan kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreatifitas dan kemampuan.
4. Intensitas yang akan dicapai Memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi. (Nova Sulastri,2016).



Untuk mengukur efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Aneuk Laot peneliti menggunakan indikator menurut pendapat Nurhayati (2017) yaitu pencapaian tujuan, ketepatan waktu, sesuai manfaat, dan hasil sesuai dengan harapan masyarakat. Karena indikator tersebut lebih cocok digunakan dan lebih kongkrit.

## **2.2 Dana Desa**

### **2.2.1 Pengertian Dana Desa**

Menurut UU desa, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pengawasan Dana Desa dilakukan oleh masyarakat melalui BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan pemerintah di atasnya, yaitu pemerintah kabupaten/kota. Adapun Alokasi Dana Desa saat ini diprioritaskan pada 3 hal yaitu pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai kewenangan desa.

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Penggunaan Dana Desa berdasarkan Pasal 25

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015, yaitu: Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku local, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan desa, maka penggunaan dana desa di prioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa.

### **2.2.2 Definisi Alokasi Dana Desa**

Alokasi dana desa (ADD) merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi dana Alokasi Khusus (DAK) (<https://pdesa.com>). Alokasi dana desa(ADD) diderivasi dari formulasi DAU dengan beberapa proposisi tambahan. Dalam beberapa hal tujuan keadilan dalam transfer dana, mendorong semangat desentralisasi, tidak diskriminatif, transparan, sederhana dan mendorong kemajuan desa penerima menarik untuk diterima sebagai landasan. Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan

mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa.

Wasistiono (2006:110) mengatakan bahwa Konsep Tentang Dana perimbangan Desa sendiri bukan merupakan suatu gagasan ekonomi (semata), melainkan suatu gagasan untuk memberikan dukungan bagi pengembangan proses politik dan proses reform di desa. Distruksi Politik dimasa lalu, tentunya memerlukan suatu proses rehabilitasi yang memadai. Sumber daya desa yang terkuras keluar, perlu di kembalikan dari prinsip pemerataan yang hilang, perlu pula segera diwujudkan agar tidak terus menerus menjadi slogan politik.

Sebagai konsekuensi diberikannya Otonomi kepada Desa maka diberikan pula Anggaran untuk mengelola daerahnya yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut akan mendorong terlaksananya otonomi Desa, Sekaligus sebagai usaha pemberdayaan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sebagai fasilitator, memfasilitasi masyarakat agar mampu menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima .

Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD yaitu minimal sebesar 10% dari DAU ditambah DBH. ADD bersumber dari

bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota kemudian dialokasikan untuk desa.

Alokasi Dana Desa disalurkan dalam dua kategori, yaitu Reguler dan Mandiri. Kategori tersebut ditentukan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun serta ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 94/PMK.07/2021, penyaluran Dana Desa Reguler dilakukan dalam tiga tahap, yaitu: Tahap I (40 persen) bulan Januari; Tahap II (40 persen) bulan Maret; dan Tahap III (20 persen) bulan Juni. Sementara, penyaluran Dana Desa Mandiri dilakukan dalam 2 tahap, yaitu Tahap I (60 persen) bulan Januari; dan Tahap II (40 persen) bulan Maret. Selain itu, di masa pandemi COVID-19, Dana Desa juga disalurkan untuk:

a. Penanganan COVID-19

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 2 Tahun 2021 dan Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021 telah menetapkan alokasi Dana Desa untuk penanganan COVID-19 minimal sebesar 8 persen dari total Dana Desa.

b. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

Penyaluran BLT-DD diharapkan mampu menahan laju peningkatan jumlah penduduk miskin pedesaan.

Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021 diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, yaitu sebagai berikut:

a. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa

- 1) Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi BUMDes;
- 2) Penyediaan listrik desa; dan
- 3) Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola BUMDes.

b. Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa

- 1) Pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
- 2) Pengembangan desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi desa.
- 3) Penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di desa.
- 4) Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan desa, desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

c. Adaptasi kebiasaan baru desa

- 1) Desa Aman Covid-19; dan
- 2) BLT-DD

Prioritas penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa yang disusun berdasarkan data yang disediakan oleh Kemendes PDTT dan aspirasi masyarakat desa. RKP Desa yang memuat prioritas penggunaan

Dana Desa menjadi pedoman dalam penyusunan APBD desa. (La Samianto 2018).

### **2.2.3 Tujuan Alokasi Dana Desa**

Maksud Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat. Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten diterjemahkan sebagai ADD.

Tujuan ADD semata-mata bukan hanya pemerataan, tetapi haruslah keadilan (berdasarkan karakter kebutuhan desa). Sehingga besarnya dana yang diterima setiap desa akan sangat bervariasi sesuai dengan karakter kebutuhan desanya.

Menurut Nick Devas (1989), prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan daerah yang mengalami perubahan paradigma seiring dengan pencanangan konsep “good governance” dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah:

### 1. Transparansi

Adanya keterbukaan pemerintah (birokrasi) di dalam proses pembuatan kebijakan tentang keuangan daerah, sehingga publik dan DPRD dapat mengetahui, mengkaji, dan memberikan masukan serta mengawasi pelaksanaan kebijakan publik yang berkaitan dengan keuangan daerah atau APBD.

### 2. Efisien

Pengelolaan keuangan daerah harus didasarkan suatu pemikiran bahwa setiap pengeluaran anggaran daerah harus diupayakan seefisien mungkin, guna menghasilkan output yang memadai. Penghematan anggaran sangat diperlukan dalam rangka mencapai efisiensi. Dengan kata lain, standar pelayanan minimal merupakan target yang harus dicapai sesuai proporsi biaya yang ditetapkan.

### 3. Efektif

Dalam proses pelaksanaan kebijakan keuangan daerah (APBD), pengelolaan anggaran haruslah tepat sasaran. Selama ini Pemda sering tidak mempedulikan apakah sasaran yang hendak dicapai dari anggaran belanja tepat atau tidak, yang penting realisasi anggaran sesuai rencana dan habis terpakai. Pemikiran

seperti ini bertentangan dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi hasil atau output.

#### 4. Akuntabilitas

Dalam pengelolaan keuangan daerah dituntut adanya pertanggungjawaban kepada public yang dapat dilakukan secara institusional kepada DPRD. DPRD yang akan menilai apakah kinerja pemda dalam mengelola keuangan daerah atau APBD baik atau buruk dengan menggunakan kriteria atau tolok ukur sesuai apa yang direncanakan semula.

#### 5. Partisipatif

Peran serta publik secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan keuangan daerah harus dijamin. Kebijakan pembangunan dalam anggaran daerah (APBD) juga harus mengakomodasikan aspirasi publik dan mengikutsertakan masyarakat secara langsung.

Beberapa hambatan yang sering ditemui di berbagai desa dalam melaksanakan pembangunan desa antara lain: 1) terbatasnya ketersediaan sumberdaya manusia yang baik dan professional.2) terbatasnya ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang mandiri, baik berasal dari kemampuan desa itu sendiri (internal) maupun sumber dana dari luar (eksternal); 3) belum tersusunnya kelembagaan sosial-ekonomi yang mampu berperan secara efektif; 4) belum terbangunnya sistem dan regulasi yang jelas dan tegas; 5) kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan rasional (Ruru,dkk,hal 83).



#### **2.2.4 Pembangunan Fisik**

Menurut Katz (Moeljarto, 1995:3) pembangunan adalah proses perubahan yang terencana dari suatu situasi nasional yang satu ke situasi nasional yang lain yang dinilai lebih tinggi. Sejalan dengan itu tingkat partisipasi masyarakat desa juga merupakan proses yang terencana dari situasi masyarakat desa yang satu ke situasi masyarakat desa yang lain yang dinilai lebih tinggi atau lebih baik. dengan kata lain pembangunan masyarakat desa adalah perubahan masyarakat desa ke arah yang lebih baik, sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditempuh melalui penerapan prinsip partisipatif. Namun konsep-konsep tersebut tidak akan berhasil baik apabila hanya dalam tataran konsep. Oleh karena itu diperlukan kebijakan lebih penting yaitu implementasi keseluruhan kebijakan tingkat partisipasi masyarakat desa. Kebijakan harus merupakan komitmen yang kuat dari pemerintah kabupaten untuk memberikan ruang lebih banyak kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan pembangunan. Hal itu dilakukan dalam rangka melaksanakan konsep dasar tingkat partisipasi masyarakat desa.

Pembangunan fisik merupakan perwujudan nyata dari pembangunan segi non fisik yang meliputi sosial budaya, sosial ekonomi dan sebagainya. Aspek pembangunan fisik merupakan perwujudan nyata suatu tuntutan kebutuhan yang disebabkan oleh pertumbuhan dan perkembangan kegiatan sosial serta budaya masyarakatnya”. Dengan kata lain bahwa perubahan itu identik

dengan adanya wujud atau bentuk dari pembangunan seperti adanya gedung-gedung, sarana perumahan, tempat beribadah, sarana pembuatan jalan, sarana pendidikan, dan sarana umum lainnya.

Pelaksanaan pembangunan fisik ditunjukkan dengan adanya proyek-proyek pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana fisik. Sehubungan dengan hal tersebut, Sujarto (1985) mengemukakan beberapa contoh proyek pembangunan fisik yang merupakan perwujudan nyata dari pembangunan segi non fisik, yaitu:

1. Proyek pembangunan fisik bidang sosial antara lain:
  - a. Bangunan perumahan
  - b. Bangunan kesehatan
  - c. Sarana pemerintahan
  - d. Jaringan fasilitas umum dan lain-lain
2. Pembangunan social budaya antara lain:
  - a. Bangunan sarana pendidikan
  - b. Tempat ibadah
  - c. Seni budaya
  - d. Bangunan museum sejarah dan lain-lain
3. Proyek fisik social ekonomi antara lain:
  - a. Pasar dan pusat perkotaan
  - b. Pusat perkantoran dan perdagangan
  - c. Bangunan pergudangan
  - d. Terminal dan stasiun kereta api

e. Jalan raya dan sebagainya

Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat sendiri. Sedangkan pemerintah memberikan bimbingan, bantuan, pembinaan, dan pengawasan. Pembangunan desa dapat dilihat dari berbagai segi yaitu sebagai suatu proses, dengan suatu metode sebagai suatu program dan suatu gerakan, sebagaimana pendapat pakar berikut ini:

1. Sebagai suatu proses adalah memperhatikan jalannya proses perubahan yang berlangsung dari cara hidup yang lebih maju/modern. Sebagai suatu proses, maka pembangunan desa lebih menekankan pada aspek perubahan, baik yang menyangkut segi sosial, maupun dari segi psikologis. Hal ini akan terlihat pada perkembangan masyarakat dari suatu tingkat kehidupan tertentu ketingkat kehidupan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan di dalamnya masalah perubahan sikap, serta perubahan lainnya yang apabila diprogramkan secara sistematis akan usaha penelitiandan pendidikan yang sangat baik.
2. Sebagai suatu metode, yaitu suatu metode yang mengusahakan agar rakyat mempunyai kemampuan yang mereka miliki. Pembangunan desa juga merupakan metode untuk mencapai pemerataan pembangunan desa dan hasil-hasilnya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945.

3. Sebagai suatu program adalah berusaha meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pedesaan baik lahir maupun bathin dengan perhatian ditujukan pada kegiatan pada bidang-bidang tertentu seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, industri rumah tangga, koperasi, perbaikan kampung halaman dan lain-lain.
4. Sebagai suatu gerakan karena pada hakekatnya semua gerakan atau usaha kegiatan pembangunan diarahkan ke desa-desa. Sebagai suatu gerakan dimana pembangunan desa mengusahakan mewujudkan masyarakat sesuai dengan cita-cita Nasional Bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa pembangunan desa meliputi beberapa faktor dan berbagai program yang dilaksanakan oleh aparat departemen, pemerintah daerah dan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaannya perlu ada koordinasi dari pemerintah baik pusat maupun daerah serta desa sebagai tempat pelaksanaan pembangunan agar seluruh program kegiatan tersebut saling menunjang dan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil.

### **2.3 Penelitian terkait**

Adapun penelitian terkait merupakan penelitian yang memang terkait dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan. Beberapa diantaranya yaitu penelitian :

Chandra,dkk. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa (Studi pada Desa Wonorejo,Kecamatan Singosari,Kabupaten Malang. Hasil dari penelitian nya adalah sebagian dari dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD sehingga penggunaan ADD tidak sesuai dengan peruntukannya. Selanjutnya, Okta Rosalinda LPD. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam menunjang pembangunan pedesaan (studi kasus Desa Segodorejo dan Desa Plosa Kerep,Kecamatan Smobito.Kabupaten Jombang. Hasil penelitian adalah Tata kelola dana ADD masih nampak belum efektif, hal ini terlihat pada mekanisme perencanaan yang belum memperlihatkan sebagai bentuk perencanaan yang efektif karena waktu perencanaan yang sempit, kurang berjalannya fungsi lembaga desa, partisipasi masyarakat rendah karena dominasi kepala desa dan adanya pos-pos anggaran dalam pemanfaatan ADD sehingga tidak ada kesesuaian dengan kebutuhan desa.

Selanjutnya Noviyanti,dkk. Analisis penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya meningkatkan pembangunan desa (Studi kasus pada Desa Suwan,Kecamatan Kalawat. Kabupaten Minahasa utara). Hasil penelitian adalah Penerapan Alokasi Dana Desa

sudah sesuai dengan tujuan pada umumnya yaitu untuk meningkatkan pembangunan baik fisik maupun nonfisik. Selain itu Penerapan Alokasi Dana Desa di Desa Suwaan juga sudah sesuai dengan prinsip pengelolaan ADD yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif. Penelitian Deti Kemalasari. Transparansi dan Akuntabilitas pemerintah desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Hasil penelitian adalah Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa sudah baik secara teknis maupun administrasi, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan alokasi dana desa merupakan kendala utama, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah guna penyesuaian perubahan peraturan setiap tahun yang berjalan.

Selanjutnya La Samianto. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Kampo-Kampo, Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi. Hasil penelitian adalah Pelaporan keuangan ADD di Desa Kampo-kampo, Kecamatan Binongko dari tahun ke tahun sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada tetapi pemanfaatnya belum sepenuhnya dilaksanakan. Sedangkan untuk pengawasan pelaksanaan Anggaran tersebut hanya sebatas sebagai fasilitator tetapi tanggungjawab sepenuhnya ada di desa langsung lewat inspektorat dan Badan Peremberdayaan Desa. Selanjutnya, Teguh Riyanto. Akuntabilitas finansial dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di kantor Desa Perangat Selatan, Kecamatan

Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Hasil penelitian adalah mulai dari pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan didepan seluruh pihak Pemerintah Desa, namun belum dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat desa.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa. Untuk lebih jelas, perhatikan tabel dibawah ini:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian terkait**

No	Penelitian dan Judul	Metode penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Chandra,dkk. (2018).Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.	Kualitatif Deskriptif.	Persamaan penelitian terletak pada metode penelitian yaitu kualitatif deskriptif.	Perbedaan peneliti pada tujuan penggunaan ADD.
2	Okta Rosalinda LPD (2016). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam menunjang pembangunan pedesaan (studi kasus Desa Segodorejo dan Desa Plosa Kerep Kecamatan Smobito. Kabupaten Jombang.	Kualitatif Deskriptif.	Persamaan penelitian terletak pada metode penelitian yait kualitatif deskripsi dan teori pembangunan desa.	Perbedaan peneliti membandingkan tata kelola ADD pada setiap desa.

**Tabel 2.1**  
**Lanjutan**

No	Penelitian dan Judul	Metode penelitian	Persamaan	Perbedaan
3	Noviyanti,dkk.(2017). Analisis penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya meningkatkan pembangunan desa (Studi kasus pada Desa Suwan Kecamatan Kalawat. Kabupaten Minahasa utara).	Kualitatif Deskriptif.	Persamaan penelitian terletak pada metode penelitian yaitu kualitatif deskripsi	Perbedaannya adalah lokasi penelitiannya.
4	Deti Kemalasari. (2016). Transparansi dan Akuntabilitas pemerintah desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.	Kualitatif Deskriptif.	Persamaan penelitian terletak pada metode penelitian yaitu Kualitatif deskripsi.	Perbedaannya teknik pengumpulan data.
5	La Samianto.(2018). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Kampo-Kampo Kecamatan Binongko. Kabupaten Wakatobi.	Kualitatif Deskriptif.	Persamaan penelitian ini terletak pada metode penelitian yaitu kualitatif deskripsi.	Perbedaannya adalah penulis membandingkan pelaporan keuangan setiap tahun di desa nya.
6	Teguh Riyanto. (2015). Akuntabilitas finansial dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di kantor Desa Perangat	Kualitatif Deskriptif.	Persamaan penelitian terletak pada metode penelitian	Perbedaan tujuan digunakan ADD.



**Tabel 2.1**  
**Lanjutan**

No	Penelitian dan Judul	Metode penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Selatan. Kecamatan Marangkayu.		yaitu kualitatif deskripsi dan	
7	Eva, dkk.(2020). Tranparansi dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Desa Kuta Timu)	Kualitatif Deskriptif.	Persamaan penelitian ini terletak pada variabelnya yaitu dana desa.	Perbedaannya adalah desa yang menjadi objek penelitian.

#### **2.4 Kerangka Berpikir**

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kota Sabang didasarkan pada peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2012 tentang pengelolaan alokasi dana desa. Melalui Alokasi dana Desa, diharapkan desa akan mampu menyelenggarakan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri. Dimana tujuan UU Desa adalah menciptakan masyarakat aktif yang mampu menjadi elemen utama dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi setiap kegiatan pembangunan yang terjadi di desa.

Untuk itu, dalam proses pengelolaan alokasi dana desa harusnya pemerintah desa tidak hanya berfokus pada penyelesaian seluruh tahapan pengelolaan alokasi dana desa dan hasil akhir berupa terciptanya pembangunan di desa. Namun pemerintah desa harusnya lebih berfokus pada menciptakan sebuah proses pembangunan yang diciptakan oleh masyarakat desa setempat,

sehingga pembangunan yang dihasilkan adalah pembangunan yang berkualitas, yakni sebuah hasil pembangunan yang menggambarkan tujuan, kebutuhan dan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat desa setempat. Akan tetapi, dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang ada Di kota Sabang belum sesuai dengan prinsip pengelolaan alokasi dana desa sehingga berdampak belum efektifnya pencapaian tujuan Alokasi Dana Desa itu sendiri. Hal tersebut utamanya pada aspek perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Adapun untuk lebih jelas terkait kerangka berfikir penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

**Gambar 2.1  
Kerangka Berfikir**



Berdasarkan kerangka berfikir di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Alokasi Dana Desa Aneuk Laot, khusus yang diperuntukkan untuk pembangunan fisik desa tersebut, mengingat bahwa desa ini merupakan salah satu desa sektor wisata. Dalam penelitian ini peneliti akan mengukur efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. Dan untuk mengukur efektivitas dengan menggunakan indikator pencapaian tujuan, ketepatan waktu, sesuai manfaat, dan hasil sesuai dengan harapan masyarakat.

Adapun pencapaian tujuan yang dimaksudkan adalah bagaimana alokasi Dana Desa bisa mencapai target yang diinginkan. Dan Ketepatan Waktu adalah penyaluran Alokasi Dana Desa dapat tersalurkan sesuai dengan waktu dan kegiatan yang telah direncanakan. Selanjutnya, sesuai manfaat dalam hal ini adalah masyarakat diharapkan dapat merasakan manfaat dari dana desa yang telah disalurkan oleh pemerintah desa. Hasil sesuai dengan harapan masyarakat.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah jenis penelitian Deskriptif Kualitatif. Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji. metode penelitian ini juga berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas, dan terperinci. Sedangkan Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Maka penelitian deskriptif kalitatif yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kota Sabang dan bagaimana meningkatkan pembangunan fisik desa di Kota Sabang dalam menjalankan program Alokasi Dana Desa (ADD).

#### **3.2 Informan Penelitian**

Informan penelitian adalah pihak yang digunakan untuk menjadi sampel dalam sebuah penelitian. Adapun informan pada

penelitian ini adalah pihak pemerintahan desa atau tokoh masyarakat Desa Aneuk Laot seperti Kechik/kepala desa, Tuhapeut gampong, ataupun pengelola Dana Desa. Selain itu, peneliti juga akan mewawancarai beberapa masyarakat Desa Aneuk laot agar terdapat informasi timbal balik baik dari pemerintah maupun masyarakatnya untuk mengukur efektivitas alokasi dana desa di Desa Aneuk Laot. Adapun beberapa orang sebagai informan pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.1**  
**Data Informan**

NO	NAMA	PEKERJAAN
1	AR	Kepala Desa Aneuk Laot
2	RZ	Bendahara kantor Desa Aneuk Laot
3	FA	Tuhapeut Desa Aneuk Laot
4	RS	Tuhapeut Desa Aneuk Laot
5	BD	Masyarakat Desa Aneuk Laot
6	YA	Masyarakat Desa Aneuk Laot
7	MS	Masyarakat Desa Aneuk Laot
8	YR	Masyarakat Desa Aneuk Laot
9	MD	Masyarakat Desa Aneuk Laot
10	FH	Masyarakat Desa Aneuk Laot

*Sumber : Data penelitian 2022*

Dari tabel di atas peneliti juga memiliki kriteria untuk penentuan informan yaitu berdasarkan usia. Dapat dilihat pada tael di bawah ini:

**Tabel 3.2**  
**Informan berdasarkan Usia**

NO	Tingkat Usia	Jumlah (Orang)
1	<30 tahun	1
2	30-40 tahun	2
3	41-55 tahun	4
4	>55 tahun	3
Total		10

*Sumber: Data diolah 2022*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa informan yang dipilih oleh peneliti memiliki usia yang berbeda-beda. Dimulai dari usia di bawah 30 tahun sampai di atas 55 tahun.

### **3.3 Jenis dan Sumber data**

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan atau diperoleh langsung dari responden. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti.

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hasil dari wawancara. Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari kantor desa, data terkait dengan Alokasi Dana Desa.

### **3.4 Teknik pengumpulan Data**

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengambil data dari berbagai sumber dokumentasi atau publikasi dari berbagai pihak yang berwenang, instansi terkait seperti pemerintah desa Anek Laot. Dokumen yang dimaksud meliputi data laporan keuangan beserta laporan target dan realisasi dari pengelolaan alokasi dana desa, peraturan tentang alokasi dana desa, dan data yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Wawancara adalah suatu teknik pengambilan data menggunakan format pertanyaan yang terencana dan diajukan secara lisan kepada responden dengan tujuan tertentu. Wawancara bisa dilakukan secara tatap muka diantara peneliti dengan responden dan bisa juga melalui telepon. wawancara digunakan untuk memperoleh data berupa penjelasan dari kepala desa Aneuk Laot mengenai hambatan yang dialami oleh pihak pemerintah desa dalam merealisasi Alokasi Dana Desa, serta usaha apa yang telah dilakukakn untuk menanggulangi hambatan yang ada.

Adapun Menurut Sugiyono (2018), dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumentasi, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

Berdasarkan penjelasan para ahli maka dapat disimpulkan bahwa metode dokumentasi merupakan cara mencari data-data atau informan pada buku-buku, catatan-catatan transkrip, jurnal, makalah dan sebagainya. Serta saat mengambil dokumentasi juga menyertai pengambilan foto-foto ketika proses wawancara dengan informan. Kemudian mendeskripsikan hasil wawancara sebagai bukti yang kuat bahwa peneliti sudah melakukan wawancara langsung ke lapangan.

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Menurut Bungin (2016:73) teknik analisis dalam penelitian kualitatif tergantung pada pendekatan yang digunakan. Penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan fenomenologis, langkah-langkah analisisnya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Peneliti memulai mengorganisasikan semua data atau gambaran menyeluruh tentang fenomena pengalaman yang telah dikumpulkan.
2. Membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan pinggir mengenai data yang dianggap penting kemudian melakukan pengkodean data.
3. Menemukan dan mengelompokkan makna pernyataan yang dirasakan oleh responden dengan melakukan horizationaliting yaitu setiap pernyataan pada awalnya diperlakukan memiliki nilai yang sama. Selanjutnya, pernyataan yang tidak relevan dengan topik dan pertanyaan maupun pernyataan yang



bersifat repetitif atau tumpang tindih dihilangkan, sehingga yang tersisa hanya horizons (arti tekstural dan unsur pembentuk atau penyusun dari fenomena yang tidak mengalami penyimpangan).

4. Pernyataan tersebut kemudian di kumpulkan ke dalam unit makna lalu ditulis gambaran tentang bagaimana pengalaman tersebut terjadi.
5. Selanjutnya peneliti mengembangkan uraian secara keseluruhan dari fenomena tersebut sehingga menemukan esensi dari fenomena tersebut. Kemudian mengembangkan textural description (mengenai fenomena yang terjadi pada responden) dan structural description (yang menjelaskan bagaimana fenomena itu terjadi).
6. Peneliti kemudian memberikan penjelasan secara naratif mengenai esensi dari fenomena yang diteliti dan mendapatkan makna pengalaman responden mengenai fenomena tersebut.

Menurut Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono (2018), analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Data Miles dan Huberman terdiri dari reduksi data, penyajian data, penarikan

kesimpulan. Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **3.5.1 Reduksi Data**

Menurut Sugiyono (2020), Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari nilai yang diperlukan. Cara mereduksi data adalah dengan melakukan seleksi, membuat ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan ke pola-pola dengan membuat transkrip penelitian untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang bagian yang tidak penting dan mengatur agar dapat ditarik kesimpulannya dan akhirnya secara tepat sesuai dengan fokus utamanya.

### **3.5.2 Penyajian data**

Penyajian data dibatasi sebagaimana sekumpulan responden yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data cenderung mengarah pada penyederhaan data, kompleks ke dalam satuan berbentuk sederhana dan selektif sehingga mudah dipahami. Penyajian ini dimaksud untuk mempermudah peneliti dalam menyajikan data yang sudah ada penelitiannya. Adanya banyak

data yang didapat menyulitkan peneliti untuk bisa melihat hasil penelitiannya karena hasil penelitian yang didapat masih berupa data-data mentah, sehingga peneliti harus mengolah yang didapat masih berupa data-data mentah, kemudian peneliti harus mengolah dan menyajikan data agar penelitiannya bisa disajikan.

### **3.5.3 Penarikan Kesimpulan**

Kesimpulan merupakan langkah akhir dalam pembuatan suatu laporan. Penarikan kesimpulan adalah usaha mencari atau memahami makna, keteraturan pola-pola penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Kesimpulan yang ditarik secara diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan pemahaman yang lebih tepat. Dengan meninjau kembali catatan-catatan lapangan dan menempatkan salinan suatu temuan dalam data, mengacu dan memanfaatkan Teknik keabsahan yang digunakan. Proses yang dilakukan di dalam penarikan kesimpulan adalah salah satu proses yang membutuhkan banyak pertimbangan, karena jangan sampai peneliti salah dalam menyimpulkan datanya.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Sejarah Kota Sabang dan Kondisi Geografis Desa Aneuk Laot**

Berbicara mengenai sejarah, nama Sabang sendiri berasal dari bahasa Arab, Shabag yang artinya gunung meletus. Mengapa gunung meletus? mungkin dahulu kala masih banyak gunung berapi yang masih aktif di Sabang, hal ini masih bisa dilihat digunung berapi di Jaboi dan Gunung berapi di dalam laut Pria Laot. Sedangkan Pulau Weh berasal dari kata dalam bahasa Aceh, “Weh” yang artinya pindah, menurut sejarah yang beredar Pulau Weh pada mulanya merupakan satu kesatuan dengan Pulau Sumatra, karena sesuatu hal akhirnya Pulau Weh, me-weh-kan diri ke posisinya yang sekarang. Makanya pulau ini diberi nama Pulau Weh.

Sejarah Pulau Weh adalah sejak adanya pelabuhan di Kota Sabang. Sekitar tahun 1900, Sabang adalah sebuah desa nelayan dengan pelabuhan dan iklim yang baik. Kemudian Belanda membangun depot batubara di sana, pelabuhan diperdalam, mendayagunakan dataran, sehingga tempat yang bisa menampung 25.000 ton batubara telah terbangun. Kapal Uap, kapal laut yang digerakkan oleh batubara, dari banyak negara, singgah untuk mengambil batubara, air segar dan fasilitas-fasilitas yang ada

lainnya, hal ini dapat dilihat dengan masih banyaknya bangunan-bangunan peninggalan Belanda.

Titik nol Indonesia dimulai dari pulau ini. Pulau yang terletak di ujung terluar dan merupakan pintu gerbang wilayah barat negeri ini. Berbagai nama dan julukan telah disebutkan oleh para pelaut untuk pulau kecil yang memiliki keindahan alam hingga ke dasar lautnya ini. Bahkan berbagai penafsiran juga telah diberikan terhadap nama terkininya yang hanya terdiri dari tiga huruf : w-e-h.

Pulau Weh memiliki dua teluk yang dalam dan terlindung, yaitu Sabang dan Balohan, sebagai pelabuhan alam. Juga sumber air bersih dan letak yang strategis. Jadi tak mengherankan bila berbagai peristiwa telah terjadi di pulau ini. Setelah pembukaan Terusan Suez pada tahun 1869, kepulauan Indonesia tidak lagi dicapai dari selatan, yaitu melalui Selat Sunda. Tetapi melalui sepanjang rute yang lebih utara, yaitu Selat Malaka, dan tentu saja melewati pulau Weh. Sayangnya data tertulis hanya merekam angka 1881 sebagai tahun terawal pulau Weh tercatat dalam sejarah tulisan yang otentik.

Tahun 1881 Belanda mendirikan Kolen Station di teluk Sabang yang terkenal dengan pelabuhan alamnya. Tahun 1883 Didirikannya Atjeh Associate oleh Factorij van de Nederlandsche Handel Maatschappij (Factory of Netherlands Trading Society) dan De Lange & Co. di Batavia (Jakarta) untuk mengoperasikan pelabuhan dan stasiun batubara di Sabang. Pelabuhan itu dimaksudkan sebagai stasiun batubara untuk

Angkatan Laut Belanda, tetapi kemudian juga melayani kapal dagang umum.

Tahun 1970, dikeluarkan UU No. 3 tahun 1970 dan No. 4 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok daerah perdagangan bebas dengan pelabuhan Sabang dan tentang daerah perdagangan bebas dengan pelabuhan bebas untuk masa 30 tahun, dengan fungsi sbb :

1. Mengusahakan persediaan (stockpiling) barang-barang konsumsi dan produksi untuk perdagangan impor, ekspor, re-ekspor maupun industri.
2. Melakukan peningkatan mutu (upgrading), pengolahan (processing), manufacturing, pengepakan (packing), pengepakan ulang (repacking), dan pemberian tanda dagang (marking).
3. Menumbuhkan dan memperkembangkan industri, lalu lintas perdagangan, dan perhubungan.
4. Menyediakan dan memperkembangkan prasarana dan memperlancar fasilitas pelabuhan, memperkembangkan pelabuhan, pelayaran, perdagangan transito, dan lain-lain.
5. Mengusahakan memperkembangkan kepariwisataan dan usaha-usaha ke arah terjelma dan terbinanya shopping centre. -Mengusahakan dan memperkembangkan kegiatan-kegiatan lainnya khususnya dalam sektor perdagangan, maritim, perhubungan, perbankan dan peransuransian.

Tahun 1985 Status Sabang sebagai Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang ditutup oleh Pemerintah RI melalui Undang-undang No. 10 Tahun 1985, dengan alasan maraknya penyeludupan dan akan dibukanya Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Tahun 1993 Posisi Sabang mulai diperhitungkan kembali dengan dibentuknya Kerjasama Ekonomi Regional Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT). (Sabang Dalam Lintasan Sejarah: 19).

Era baru untuk Sabang, ketika pada tahun 2000 terjadi Pencanangan Sabang sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas oleh Presiden KH. Abdurrahman Wahid di Sabang dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2000 pada tanggal 22 Januari 2000. Hal ini berlanjut dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tanggal 1 September 2000, yang selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. Aktivitas Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Sabang pada tahun 2002 mulai berdenyut dengan masuknya barang-barang dari luar negeri ke kawasan Sabang. Tetapi pada tahun 2004 aktivitas ini terhenti karena Aceh ditetapkan sebagai Daerah Darurat Militer.

Sabang juga mengalami gempa dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004, namun karena palung-palung di Teluk Sabang yang sangat dalam mengakibatkan Sabang selamat dari tsunami.

Sabang kemudian dijadikan sebagai tempat transit udara dan laut yang membawa bantuan untuk korban tsunami di daratan Aceh. Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh]-Nias menetapkan Sabang sebagai tempat transit untuk pengiriman material konstruksi dan lainnya yang akan dipergunakan di daratan Aceh.

Dari segi geografis Indonesia, wilayah Kota Sabang berada pada  $95^{\circ}13'02''$ - $95^{\circ}22'36''$  BT, dan  $05^{\circ}46'28''$ - $05^{\circ}54'-28''$  LU, merupakan wilayah administratif paling utara, dan berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Malaysia, Thailand, dan India. Wilayah Kota Sabang dikelilingi oleh Selat Malaka di Utara, Samudra Hindia di Selatan, Selat Malaka di Timur dan Samudra Hindia di Barat.

Pulau Weh mengalami dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan lazimnya jatuh pada bulan September sampai Februari. Musim kemarau pada bulan Maret hingga bulan Agustus. Menurut hasil pengukuran Stasiun Meteorologi Sabang, curah hujan yang tercatat rata-rata 1.745–2.232 mm/tahun, dengan angka terendah pada bulan Maret sebesar 18 mm dan angka tertinggi pada bulan September sebesar 276 mm. Pada bulan September dan Oktober terjadi peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. (<https://disparbud-dev.sabangkota.go.id>).

Kota Sabang sendiri terdiri dari beberapa desa, salah satunya adalah Desa Aneuk Laot. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di



Desa Aneuk Laot. Desa Aneuk Laot merupakan Desa Wisata yang berbasis Budaya. Desa Wisata Aneuk Laot memiliki beraneka ragam budaya yang masih terpelihara saat ini. Seperti membuat kue Tradisional KeuKarah, yang merupakan kue sebagai isi talam saat mempelai laki laki (Antat Linto) ke rumah mempelai wanita. Saat ini masih di jumpai di desa. Kegiatan ini di jadikan atraksi wisatawan yang berkunjung ke desa. Belajar menabuh rapai bukan suatu yang mudah, ketukan yang menghasilkan irama serta goyangan badan penabuh membuat tradisi ini menjadi menarik, ini di ajarkan di desa untuk wisatwan yang ingin mempunyai pengalaman menarik.

Desa yang memiliki Danau terbesar di Kota Sabang, membuat suasana makin sejuk dan asri, yang di kelilingi oleh hutan lindung. Danau merupakan wisata alam yang masih asri. Dengan di pimpin oleh seorang Keuchik ( Kepala Desa ), dan di bantu oleh pemangku kepentingan, ibu-ibu PKK, Pokdarwis, Bumdes, Pengerak wisata di desa serta komunitas lainnya, menjadi kan Desa Aneuk Laot, menjadi desa yang wajib dikunjungi oleh wisatawan yang berkunjung ke sabang (Sabang Dalam Lintasan Sejarah: 66).

Desa Aneuk Laot terletak di wilayah Kecamatan Sukakarya Kota Sabang dengan luas wilayahnya 500 Ha yang dibagi menjadi 4 Jurong yaitu:

1. Jurong Putro Bungsu
2. Jurong Putro Haloh
3. Jurong Putro Ijo

#### 4. Jurong Guda Meuh

Wilayah Desa Aneuk Laot memiliki jenis guna lahan permukiman, perkantoran dan perkebunan. Iklim Desa Aneuk Laot, seperti gampong-gampong lain di wilayah Provinsi Aceh mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal ini mempengaruhi pola tanaman dan kebun walaupun tidak dominan disebabkan sedikitnya jumlah masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani. Hal ini juga disebabkan karena topografi Sabang yang dipenuhi dengan daerah perbukitan.

#### **Kondisi Geografis**

Secara Geografis Gampong Aneuk Laot terletak LU  $05^{\circ}46'28''$ - $05^{\circ}54'28''$  dan BT  $95^{\circ}13'02''$ - $95^{\circ}22'36''$  yang mempunyai luas  $\pm 500,14$  Ha dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Gampong Cot Bau
2. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Krueng Raya Gunong Labu
3. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Gampong Kota Bawah
4. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Gampong Cot Abeuk.

#### **Kondisi Demografis**

Gampong Aneuk Laot terletak di wilayah Kecamatan Sukakarya Kota Sabang dengan luas wilayahnya 500 Ha yang dibagi menjadi 4 Jurong yaitu:

1. Jurong Putro Bungsu

2. Jurong Putro Haloh
3. Jurong Putro Ijo
4. Jurong Guda Meuh

Gampong Aneuk Laot memiliki jumlah penduduk 1055 jiwa dan 325 KK, yang tersebar dalam 4 Jurong dengan rincian pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Menurut Jurong**

No	Nama Jurong	Jiwa	Laki-laki	Perempuan
1	Putroe Ijo	382	189	193
2	Putroe Haloh	224	108	116
3	Guda Meuh	215	113	102
4	Putroe Bungsu	234	118	116
	JUMLAH	1055	528	527

#### **4.2 Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk Pembangunan Fisik Kota Sabang (studi pada Desa Aneuk Laot Kecamatan Sukakarya).**

Pengelolaan Alokasi Dana Desa mulai diimplementasikan di Indonesia pada tahun 2005 dengan dasar Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang desa yang kini telah di pertegas dengan lahirnya UU No. 6 tahun 2014 tentang desa. Aturan ini mewajibkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengalokasikan dana transfer dari pusat dan di teruskan ke

rekening desa yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan perolehan bagian keuangan desa dari Kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa.

Adapun Alokasi Dana Desa di Desa Aneuk Laot kecamatan Sukakarya ini secara keseluruhan diperuntukkan untuk beberapa bidang seperti:

1. Pendidikan. Pengalokasian dana desa untuk bidang pendidikan dalam hal ini pihak pemerintah desa mengadakan penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat desa Aneuk Laot.
2. Kesehatan. Dalam bidang kesehatan, pihak pemerintah desa juga mengalokasikan dana desa dalam beberapa kegiatan seperti penyelenggaraan pos kesehatan gampong/Polindes milik gampong (obat, Insentif, dsb), penyelenggaraan posyandu dan penyelenggaraan Rumah Desa Sehat (RDS) Stunting.
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang, pada bidang ini pemerintah

desa mengalokasikan dana desa untuk pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan balai kemasyarakatan desa.

4. Kawasan pemukiman. Bentuk pengalokasian Dana Desa dalam bidang ini adalah pihak pemerintah desa melakukan pemeliharaan Fasilitas Jamban umum/MCK Umum,dll. Tagihan rekening listrik untuk Penerangan Jalan Umum(PJU), dan Kebersihan lingkungan/pemukiman.

Berdasarkan pembagian bidang di atas, peneliti lebih memfokuskan pada pembangunan fisik. Dimana, pembangunan fisik yang dimaksudkan lebih berfokus pada pembangunan fisik bidang infrastruktur. Dalam hal ini contoh pembangunan fisik infrastruktur yang telah dilakukan oleh pemerintah desa Aneuk Laot:

1. Pembuatan saluran pembuangan. Adapun pembuatan saluran pembuangan ini telah direalisasikan pada hampir seluruh kawasan desa Aneuk Laot. Pembuatan saluran pembuangan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya banjir saat curah hujan lebat yang terjadi terus-menerus karena banyaknya keluhan masyarakat akibat genangan air. Tidak hanya pembuatan saluran baru, pihak desa juga melakukan perbaikan pada saluran-saluran pembuangan yang lama agar tetap dapat digunakan dengan baik. Dalam pembangunan ini, pihak pemerintah desa juga melibatkan masyarakat yang dijadikan buruh untuk merealisasikan pembuatan saluran pembuangan.

2. Perbaikan masjid. Salah satu pembangunan fisik yang dilakukan oleh pemerintah desa Aneuk Laot adalah perbaikan masjid. Perbaikan yang dilakukan seperti cat ulang tembok dinding dalam maupun luar masjid, mengganti plafon masjid dan melengkapi keperluan masjid lainnya seperti mic dan speaker. Namun, perbaikan masjid bukanlah pembangunan yang sangat urgen. Perbaikan ini dilakukan setelah pembangunan penting yang lain sudah terealisasi.
3. Pembuatan jalan paving blok pada akses-akses tertentu. Pembuatan jalan paving blok merupakan salah satu pembangunan yang urgent atau penting untuk segera dilakukan, karena ada beberapa akses jalan yang tidak bisa dilewati saat musim hujan. Hal itu disebabkan jalanan yang masih berbentuk tanah saja, jadi saat musim hujan akan sulit dilalui karena genangan air dan licin akan membahayakan keselamatan masyarakat yang melintas. Jadi pihak pemerintah desa Aneuk Laot dengan segera melakukan pembangunan dengan membuat jalan yang menggunakan paving blok agar memudahkan akses jalan untuk masyarakat. Adapun beberapa akses jalan yang telah dibangun yaitu jalan ke Tempat Pemakaman Umum (TPU) , jalan menuju rumah beberapa masyarakat yang masih berbentuk tanah saja, dan ke tempat-tempat wisata yang ada di desa Aneuk Laot seperti Danau dan taman.

4. Pembangunan kamar mandi. Salah satu pembangunan fisik yang dilakukan oleh pemerintah desa Aneuk Laot adalah pembangunan kamar mandi. Pembangunan ini termasuk salah satu yang disegerakan karena termasuk pembangunan yang penting dimana banyak nya rumah masyarakat yang belum mempunyai kamar mandi. Jadi warga masih menggunakan wc umum seperti di meunasah atau sungai kecil di dekat rumah mereka. Dengan adanya pembangunan kamar mandi disetiap rumah, masyarakat tidak lagi harus bersusah payah untuk mandi atau buang hajat terutama pada malam hari. Adapun pembangunan kamar mandi untuk rumah warga direalisasikan pada seluruh jurong yang ada di desa Aneuk Laot.

Dalam hal ini, pihak pemerintah desa selalu mengutamakan pembangunan fisik yang mendesak atau sangat penting terlebih dulu, seperti pembangunan kamar mandi di rumah warga, pembuatan saluran pembuangan dan pembuatan jalan paving blok pada akses-akses tertentu. Pembangunan fisik bidang infrastruktur yang dibangun juga sangat diperlukan oleh masyarakat desa Aneuk Laot sehingga dengan ini berdampak positif dalam kesejahteraan masyarakat desa. Senada dengan pernyataan di atas, berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Kepala Desa Aneuk Laot yaitu Bapak AR tentang Bagaimana bentuk Pengalokasian Dana Desa untuk Desa Aneuk Laot khususnya dalam pembangunan fisik?. Adapun informasi yang didapat sebagai berikut:

*“Dana Desa dialokasikan terutama untuk pembangunan fisik yang terpenting dulu, untuk yang sangat diperlukan oleh masyarakat desa. Contohnya seperti pembangunan wc umum, jalan paving blok, saluran pembuangan, dan lain lain yang penting. Intinya diutamakan yang sangat urgent lebih dulu”.* (wawancara 24 oktober 2022).

Dengan demikian, pihak aparat desa telah berusaha mengalokasikan dana ADD ini sesuai berdasarkan kebutuhan penting untuk masyarakat yang ada di desa tersebut. pembangunan fisik dibangun dengan tujuan dapat mensejahterakan, dapat digunakan dan dijaga serta dipelihara dengan baik oleh masyarakat desa.

Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat maka dalam pengalokasian dana desa ini pemerintah desa terlebih dahulu akan melakukan perencanaan yang matang sesuai dengan kebutuhan desa. Dimana dalam hal ini proses pengalokasian nya akan dilakukan pertama kali dengan perencanaan, lalu pelaksanaan dan terakhir dengan pertanggungjawaban. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini:

#### 1. Tahap Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Perencanaan merupakan tahapan yang diperlukan dan digunakan agar penggunaan ADD lebih efektif, efisien dan tepat sasaran. Adapun tahap perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Aneuk Laot, telah sesuai dengan ketentuan yang



berlaku dimana telah diawali dengan pembentukan tim pelaksana dan proses perencanaan dilakukan dengan model partisipatif dalam kegiatan musrembang. Tim pelaksana Alokasi Dana Desa yang dimaksud dalam perencanaan tersebut terdiri dari Kepala Desa selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), sekretaris desa selaku Penanggung Jawab Administrasi (PJAK), bendahara desa selaku Kepala Urusan Keuangan (KUK) dan dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.

Bentuk perencanaan pengalokasian dana desa di desa Aneuk Laot ini dilakukan dengan perencanaan model partisipatif yaitu melalui musrembang desa dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari lembaga masyarakat, tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat desa. Musrembang desa tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat agar turut serta berpartisipasi dalam menyusun dan menentukan rencana kegiatan pembangunan di desa. Sehingga rencana kegiatan yang tertuang dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang dihasilkan adalah gambaran dari harapan dan kebutuhan seluruh masyarakat setempat.

Adapun hasil pengamatan dan informasi yang telah diperoleh menunjukkan bahwa kegiatan musrembang dalam tahapan perencanaan di Desa Aneuk Laot sudah memenuhi ketentuan dan sudah menyentuh kepada esensi yang terkandung dari maksud kegiatan musrembang desa. Hasil wawancara peneliti dengan bapak AR selaku Kepala desa/ Keuchik di Desa Aneuk Laot mengenai tahapan perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa

dan bagaimana partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan musrembang, yaitu: *“Dalam proses musrembang yang telah dilakukan, partisipasi masyarakat sudah di kategorikan baik. Masyarakat yang hadir hanya 60% dari total jumlah masyarakat usia produktif. Dan ditambah dengan banyaknya aspirasi yang mereka sampaikan pada musrembang yang sedang berlangsung. Hal ini bisa terjadi karena masyarakat desa yang mempunyai ide-ide dan kepedulian terhadap desanya”*(wawancara 24 okt 2022).

Selanjutnya peneliti mewawancarai bapak YR sebagai masyarakat terkait perencanaan pengelolaan ADD. Adapun informasi yang telah diperoleh yaitu: *“Kami sebagai masyarakat sudah dilibatkan dalam perencanaan pengelolaan ADD ini, karena diadakannya musrembang oleh pemerintah desa. Ini menjadi salah satu kesempatan kami selaku masyarakat untuk memberikan aspirasi untuk meningkatkan kesejahteraan di desa ini”* (wawancara 24 okt 2022).

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas terkait perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Aneuk Laot dapat dilihat bahwa penyusunan perencanaan Alokasi Dana Desa sudah memenuhi esensi dan pemerintah desa juga memberikan informasi kepada masyarakat dan juga melibatkan secara langsung pada proses musrembang yang dilakukan. Karena pada dasarnya dalam mencapai kesepakatan terkait dengan pengalokasian dana desa diperlukan musyawarah antara masyarakat desa dan pemerintah desa. Dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan juga akan

lebih memudahkan pihak pemerintah desa untuk mengetahui kebutuhan masyarakat.

## 2. Tahapan Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Tahapan pelaksanaan merupakan lanjutan dari tahap perencanaan. Ketika tahap perencanaan telah dilakukan maka selanjutnya melakukan alokasi terhadap perencanaan yang telah dirancang. Dalam hal ini, untuk alokasi dana desa pada tahap ini adalah menyesuaikan anggaran yang telah direncanakan dengan proses pelaksanaannya. Alokasi Dana Desa di peruntukan untuk pelaksanaan fisik berupa infrastruktur fasilitas penunjang masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan rencana kegiatan pemerintah desa sudah cukup jelas. Hal ini karena masyarakat juga dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dengan cara memperkerjakan masyarakat dalam pembangunan fisik yang telah direncanakan sebelumnya. Pemerintah desa juga telah memberikan informasi terkait hasil musrembang yang mana saja yang akan terealisasi. Namun ada beberapa masyarakat yang mengeluh terkait kurang transparannya pihak pemerintah desa tentang jumlah Dana Desa yang dialokasikan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik Desa Aneuk Laot. Hal ini seperti pernyataan salah satu anggota masyarakat Desa Aneuk Laot yaitu bapak MD yang menyatakan bahwa: *“Sebenarnya masyarakat banyak yang mau berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa ini, tapi kurang transparannya pihak pemerintah desa terkait*

*jumlah dana yang dikeluarkan pada pelaksanaan kegiatan juga berpengaruh pada keinginan masyarakat untuk berpartisipasi. Paling tidak ada sedikit baliho atau spanduk yang menjelaskan rincian dana yang keluar pada setiap kegiatan ataupun pembangunan”(wawancara 25 okt 2022).*

Adapun terkait pernyataan diatas ada pendapat lain dari salah satu tokoh masyarakat atau Tuhapeut Desa Aneuk laot yaitu bapak RS, beliau mengatakan: *“Pelaksanaan kagiatan rencana Pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah melibatkan masyarakat desa ini. Tapi memang kondisi desa juga dapat dikatakan sudah kurang Harmonis, mungkin banyak nya masyarakat yang punya kesibukan sendiri menjadi salah satu penyebabnya”(wawancara 24 okt 2022).*

Dalam tahapan pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa Di Desa Aneuk Laot ini, dari setiap pembangunan desa yang dilakukan yakni seperti pembangunan saluran pembuangan/got dan pembuatan jalan paving blok untuk akses tertentu, serta pembangunan kamar mandi bagi rumah yang belum ada dapat terselesaikan dengan baik namun dikarenakan kurangnya transparansi informasi terkait jumlah anggaran untuk pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan di belum efektif. Adapun terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Aneuk Laot ini, peneliti mendapatkan informasi dari hasil wawancara dengan bapak RZ sebagai bendahara kantor

desa Aneuk Laot tentang Apakah pengalokasian ADD untuk pembangunan fisik Desa Aneuk Laot sudah mencapai target?, beliau menyatakan bahwa: *“Jika untuk target, ada beberapa yang belum mencapai target. Hal ini dikarenakan adanya beberapa kendala dalam pelaksanaannya baik dari segi waktu maupun pengerjaannya. Tapi untuk pembangunan yang penting sudah mencapai target karena diutamakan lebih dulu”*(wawancara 24 okt 2022).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa pada dasarnya target untuk pelaksanaan dari Alokasi Dana Desa ini sudah hampir mencapai beberapa instrumen yang ingin dicapai. Hanya saja dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala, diantaranya adalah dari segi waktu maupun kondisi alam. Dalam hal ini pihak pemerintah desa berupaya agar semua pembangunan tetap berjalan dan selesai sesuai seperti yang direncanakan dan tidak memakan waktu yang jauh dari rencana.

### 3. Tahapan Pertanggung Jawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Tahapan pertanggungjawaban merupakan tahapan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab (pertanggungjawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan. Adapun bentuk-bentuk tahapan pertanggungjawaban ADD ini adalah dilakukan dalam bentuk penyusunan laporan pertanggungjawaban yang disediakan

oleh aparat desa untuk dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat maupun kepada masyarakat. Dalam hal desa, bentuk pertanggungjawabannya adalah dalam bentuk penyusunan laporan yang tidak dipiblis secara umum kepada masyarakat, hanya dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat. Jadi masyarakat tidak mendapat informasi kemana saja alokasi dana desa terutama untuk pembangunan fisik. Biasanya, pihak pemerintah desa akan membuat baliho atau spanduk terkait kemana saja pengalokasian dana desa baik tentang dana untuk pembangunan yang akan dilakukan maupu yang telah dilakukan. Hal itu adalah salah satu bentuk laporan yang disampaikan untuk masyarakat. Namun, pihak pemerintah desa Aneuk Laot belum melakukan bentuk laporan pertanggungjawaban seperti itu maka masyarakat beranggapan bahwa pemerintah desa tidak tranparan terkait laporan pertanggungjawaban.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, mereka juga mengatakan bahwa tidak mengetahui bagaimana informasi terkait pengalokasian dana desa yang diperuntukkan untuk pembangunan. Hanya saja, bukti fisik yang telah dibangun seperti pembuatan jalan, pembuatan saluran pembuangan, mereka dapat merasakan manfaatnya. Adapun setelah selesainya seluruh pembangunan yang dilakukan, pemerintah juga ikut turun tangan melakukan evaluasi pada hasil pembangunan untuk melihat apakah sudah dilakukan sesuai rencana dan standar pembangunan maupun

kebutuhan masyarakat dan melihat apakah pengalokasian dana desa sudah sesuai tujuan atau tidak.

Dalam hal ini tahapan penyelesaian penyusunan laporan pertanggung jawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik Di Desa Aneuk Laot, dalam tahapan pertanggung jawaban ini bisa dikatakan belum efektif, dimana penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang disusun oleh pemerintah desa, namun penyusunan laporan pertanggung Jawaban tidak ada transparansi kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengetahui tanggungjawab mereka sebagai tim evaluasi dari setiap kegiatan yang dilakukan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan pertanggung jawaban memang benar dibuat langsung oleh pihak pemerintah desa Aneuk Laot sendiri. Namun karena kurang transparan dan kurang informasi kepada masyarakat maka sebagian masyarakat mempertanyakan hal itu, apakah laporan itu dibuat oleh pihak ketiga atau pihak lain. Salah satu prinsip pengelolaan anggaran Alokasi Dana Desa ini bahwa seluruh kegiatan harus di evaluasi bersama dengan masyarakat. Hal ini mengidentifikasi bahwa dalam tahapan pertanggungjawaban hendaknya pemerintah tidak hanya melakukan pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten, melainkan juga pada masyarakat guna memberikan informasi dan mengevaluasi kegiatan pembangunan fisik yang terjadi di Desa.

### **4.3 Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk Pembangunan Fisik Kota Sabang (studi pada Desa Aneuk Laot Kecamatan Sukakarya).**

Alokasi dana desa salah satunya ditujukan untuk pembangunan fisik Kota Sabang, dalam hal ini khususnya pada Desa Aneuk Laot kecamatan Sukakarya yang mana untuk melihat apakah ini telah sesuai dengan efektifitas pengalokasian dana desa dapat diukur dengan beberapa indikator efektifitas. Adapun untuk mengukur efektifitas pengalokasian Dana Desa pada Desa Aneuk Laot ini, peneliti menggunakan indikator efektifitas dari Nurhayati(2017) yaitu pencapaian tujuan, ketepatan waktu, sesuai manfaat, dan hasil sesuai dengan harapan masyarakat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada uraian berikut:

#### **1. Pencapaian tujuan.**

Dalam hal ini, pencapaian tujuan merupakan salah satu indikator utama untuk mencapai keberhasilan dari program yang ingin dicapai. Pengelolaan dana desa dapat dikatakan efektif apabila penggunaannya sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat dan desa sehingga tujuan yang direncanakan dapat tercapai dengan baik. Adapun beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam pengelolaan alokasi Dana Desa di Desa Aneuk Laot adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat.

Dalam hal ini yang dimaksud meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar



masyarakat seperti pengadaan bantuan-bantuan berupa santunan dan juga sembako, hal ini dilakukan guna menurunkan tingkat kemiskinan di desa. Pihak pemerintah desa juga berupaya mengadakan program pasar murah agar kebutuhan dapat terpenuhi namun dengan harga yang jauh lebih murah untuk menjaga kestabilan ekonomi masyarakat desa. Dari pernyataan tersebut, peneliti juga telah mewawancarai bapak Kepala Desa Aneuk Laot yaitu bapak AR terkait tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, beliau menyatakan bahwa: *“Selaku pihak pemerintah desa selalu berupaya mengatur program-program yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mulai dari pembangunan maupun program-program lainnya seperti menyusun bantuan-bantuan terutama bantuan untuan masyarakat miskin baik dalam bentuk apapun mulai dari santunan berupa uang maupun sembako”*.

Adapun terkait pernyataan di atas, peneliti juga telah mendapatkan informasi dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat, salah satunya dengan ibu MS dan beliau mengatakan: *“Pembangunan fisik yang sudah dilakukan atau dibangun menurut saya sudah sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya dan program-program yang diadakan oleh pihak pemerintah desa juga sangat membantu terutama untuk masyarakat miskin karena adanya bantuan dari pihak desa. Jadi mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”*(wawancara 25 okt 2022).

Untuk mendukung pernyataan di atas, peneliti juga mendapatkan informasi tambahan dari bapak BD sebagai masyarakat tentang kesejahteraan masyarakat, beliau mengatakan: *“Jika untuk pencapaian tujuan, Alhamdulillah sudah tercapai dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat, dapat kita lihat adanya program-program yang membantu terutama untuk masyarakat miskin. Itu juga penting dan sangat bermanfaat. Jadi semua tujuan yang direncanakan pada awal rencana pengalokasian sudah tercapai”* (wawancara 26 okt 2022).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Aneuk Laot ini sudah mencapai tujuan sesuai dengan yang direncanakan. Maka ini membuktikan sudah memenuhi indikator utama dalam mengukur efektivitas, yaitu pencapaian tujuan. Dimana tujuan ini efektif apabila penggunaannya sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat sehingga tujuan pun tercapai. Dalam hal ini pihak pemerintah desa sudah berupaya sebaik mungkin mengefektifkan pengelolaan dana desa agar segala perencanaan dan pelaksanaan untuk pembangunan mencapai target dan tujuannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya data yang diperoleh dari kantor desa Aneuk Laot. Penelitian ini menggunakan data kemiskinan di Desa Aneuk Laot sebagai data pendukung. Adapun data kemiskinan di Desa Aneuk Laot sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Penduduk Miskin di Desa Aneuk Laot, 2018-2021**

NO	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin
1	2018	74
2	2019	72
3	2020	69
4	2021	65

*Sumber: kantor desa Aneuk Laot.*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat kemiskinan menurun di setiap tahunnya. Adanya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa aneuk laot sangat mempengaruhi tingkat kemiskinan. Dari hasil survey dan wawancara dengan pihak pemerintah desa yang dilakukan peneliti pada Desa Aneuk Laot, dapat diketahui tingkat pendapatan masyarakat di Desa Aneuk Laot bertambah atau meningkat sekitar  $\pm 5\%$  pada setiap tahunnya. karena adanya sarana-sarana yang membuka lapangan pekerjaan. Dengan demikian, berkaitan dengan hal tersebut juga mempengaruhi tingkat pengangguran yang ada di desa Aneuk laot mengalami penurunan sekitar  $\pm 3\%$  pada setiap tahunnya.

b. Pengembangan potensi ekonomi lokal.

Untuk mencapai tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat, pihak pemerintah melakukan pembangunan pertokoan guna dapat digunakan masyarakat untuk menjadikan

lapak seperti UMKM. Adapun bentuk usaha yang telah berjalan yaitu warung kopi, depot air minum, toko sembako/ Toko Serba Ada (TOSERBA). Seluruh usaha dikelola oleh masyarakat desa sebagai pekerja dan tetap diawasi oleh pihak pemerintah desa. Peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak AR selaku kepala Desa, beliau mengatakan: “ *Ada pembangunan yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dan memajukan usaha-usaha kecil milik warga desa seperti pertokoan. Dimana beberapa usahanya memang dikelola oleh pihak kantor desa dan beberapa disewakan pada masyarakat*”. Begitupun dengan masyarakat Desa Aneuk Laot, untuk memperkuat hasil wawancara dengan kepala desa peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat yaitu bapak YP, beliau mengatakan: “*Pembangunan yang sudah dilakukan oleh pihak pemerintah desa sangat bermanfaat untuk masyarakat. Ada pertokoan yang dapat disewa untuk memulai usaha dan pembangunan jalan juga sudah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendirikan kios-kios kecil untuk berjualan bermacam ragam jajanan anak-anak. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat*”.

- c. Memudahkan aktivitas masyarakat dengan melakukan pembangunan.

Dalam hal ini yang dimaksud memudahkan adalah pihak pemerintah desa mengadakan program-program pembangunan yang berfokus pada pembangunan fisik. Pemerintah desa

berupaya meingkatkan pembangunan fisik seperti fasilitas-fasilitas yang membantu memudahkan aktifitas dan kegiatan yang dilakukan masyarakat desa sehari-hari. Peneliti mewawancarai bapak kepala desa yaitu bapak AR terkait pembangunan yang dilakukan untuk tujuan tersebut dan beliau mengatakan: *“Pihak desa juga mengadakan pembangunan-pembangunan untuk membantu masyarakat agar aktifitas mereka lebih mudah. Ada beberapa pembangunan yang dilakukan dan sudah digunakan oleh masyarakat.”*

Senada dengan pernyataan dari bapak kepala desa, peneliti juga mendapatkan informasi tambahan dengan melakukan wawancara terhadap beberapa masyarakat. Salah satunya ibu FH. Beliau mengatakan yaitu: *“Alhamdulillah sebagai masyarakat saya ikut merasakan manfaat dari program-program yang diadakan oleh pemerintah desa Aneuk Laot ini seperti pembangunan jalan, ini sangat membantu saya dalam pekerjaan karena memudahkan akses menuju lokasi tertentu”*.

Salah satu program pembangunan yang dibuat oleh pemerintah Desa Aneuk Laot adalah pembangunan jalan. Adapun salah satu bukti contoh jalan yang telah dibangun guna memudahkan akses masyarakat menuju perumahan warga dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

### Gambar 4.1 Proyek Pembangunan Gampong Tahun Anggaran 2020



*Sumber: Kantor desa Aneuk Laot*

Dalam hal ini pencapaian tujuan untuk pengalokasian dana desa di desa Aneuk Laot dapat dikatakan bahwa secara garis besar telah mencapai tujuan yang menjadi targetnya yang mana salah satunya untuk kebutuhan kesejahteraan masyarakat terutama bagian-bagian penting yang urgent untuk segera dilakukan. Ada beberapa bukti ketercapaiannya tujuan yang telah dirancang, seperti:

- 1) Pembangunan jalan, pembuatan jalan paving blok pada akses-akses ke lokasi tertentu sudah dilakukan dan dapat digunakan dan sangat memudahkan aktivitas masyarakat desa. Pihak pemerintah desa membangun jalan baru dan

memperbaiki beberapa jalan yang rusak, contohnya pembangunan jalan menuju perumahan warga. Panjang jalan yang sudah dilakukan  $\pm 50$  Meter dan adapun panjang jalan yang dilakukan untuk akses menuju Tempat Pemakaman Umum  $\pm 120$  Meter.

- 2) Pembuatan saluran pembuangan air/got/drainasedrainase, dengan adanya program pembuatan saluran pembuangan ini menurunkan resiko banjir pada saat cuaca hujan deras. Pembangunan ini dilakukan pada seluruh wilayah Desa Aneuk Laot yang terbagi menjadi 4 jurong/lorong. Adapun total keseluruhan panjang saluran yang telah dibangun  $\pm 1,5$  KM.
- 3) Pembuatan kamar mandi. Banyaknya rumah warga yang belum memiliki kamar mandi ini menjadi salah satu perhatian khusus bagi pemerintah Desa Aneuk Laot. Hal ini juga. Pembangunan kamar mandi ini menjadi salah satu bukti tercapainya tujuan pemerintah desa untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa telah membentuk panitia untuk mendata lebih akurat rumah warga yang perlu dan pantas menerima bantuan pembangunan ini. Maka hasil survei yang dilakukan peneliti total keseluruhan ada 15 kamar mandi yang dibangun pada Desa Aneuk Laot.
- 4) Perbaikan masjid. Pada Desa Aneuk Laot terdapat 1 Masjid yang diberi nama Masjid Babut Taqwa. Masjid ini

menjadi satu-satunya tempat ibadah yang terbesar di desa Aneuk Laot, karena setiap jurong hanya terdapat meunasah saja. Pembangunan ini dilakukan juga untuk kenyamanan masyarakat ketika melaksanakan ibadah di dalam masjid.

Namun demikian, ada beberapa hal yang dalam pelaksanaannya tidak mencapai target waktu dan pelaksanaannya. Misalnya perbaikan masjid, perbaikan masjid juga dianggap penting akan tetapi saat ini pembuatan jalan dan pembuatan kamar mandi lebih urgent untuk segera diselesaikan terlebih dulu baru disusul dengan perbaikan masjid. Adapun pencapaian tujuan dapat dikatakan sesuai target apabila perencanaan sesuai dengan pelaksanaan. Misalnya, pembuatan jalan menggunakan paving blok, bukan hanya semen cor saja. Hal itu sesuai dilaksanakan sesuai dengan bentuk yang telah direncanakan.

Adapun untuk mencapai tujuan diperlukan juga perencanaan yang lebih terarah dan jelas agar tujuan dapat dicapai tepat sasaran dan sesuai targetnya, dimana salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan musyawarah dan berbagai upaya agar tidak tersesat dalam mencapai tujuan. Dengan pelaksanaan yang efektif dan efisien maka pihak pemerintah desa juga akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan yang efektif maka akan semakin didekatkan dengan tujuannya.



Pihak pemerintah Desa Aneuk Laot sudah berupaya mengatur strategi yang bagus dan matang. Tujuan dari strategi ini adalah untuk mengarahkan dan mengoptimalkan kegiatan program yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk kesejahteraan masyarakat. Perancangan strategi yang hendak dicapai tidak terlepas dari pihak-pihak desa untuk menciptakan keberhasilan tujuan yang ingin dicapai. Strategi juga salah satu hal penting dalam pelaksanaan dan pengembangan program infrastruktur desa. Keberhasilan pihak pemerintah Aneuk Laot sudah terlihat jelas karena seluruh tujuan yang direncanakan sudah tercapai dan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat desa.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Olivia Kawowode, ddk (2018) menunjukkan bahwa Pencapaian tujuan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kalinaun sudah memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Kalinaun sesuai dengan apa yang telah direncanakan bersama. Berbagai program telah direncanakan baik dari segi pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat. Dalam pembangunan desa yaitu pembangunan talud, pengadaan air bersih dan pembangunan drainase sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat seperti, kegiatan posyandu, pelatihan peningkatan aparatur pemerintah desa, pelatihan kelompok perempuan, pelatihan karang taruna dan pelatihan kelompok usaha ekonomi kecil. Namun dalam segi pembangunan tidak ada pembangunan apabila tidak ada masalah yang terjadi. Begitu juga halnya dengan Desa Aneuk Laot, sejauh ini pembangunan yang dilakukan sudah

sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan masyarakat desa. Hasil yang diperoleh dari pembangunan juga terlihat sesuai dengan harapan masyarakat maupun pihak pemerintah desa. Segala tujuan yang dirancang juga dapat dicapai.

## 2. Ketepatan waktu.

Adapun yang dimaksud dalam ketepatan waktu adalah suatu proses dimana penyaluran dan penggunaan dana desa sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan hingga berakhirnya kegiatan. Dalam hal ketepatan waktu untuk pengalokasian dana desa ini yang menjadi kendala. Sebenarnya sudah direncanakan sesuai dengan waktu dan pada hakikatnya semua program terealisasi tetapi tidak sesuai dengan waktu yang direncanakan. Hal ini dikarenakan adanya kondisi-kondisi alam atau kondisi tertentu yang mengharuskan pekerjaan ini tertunda.

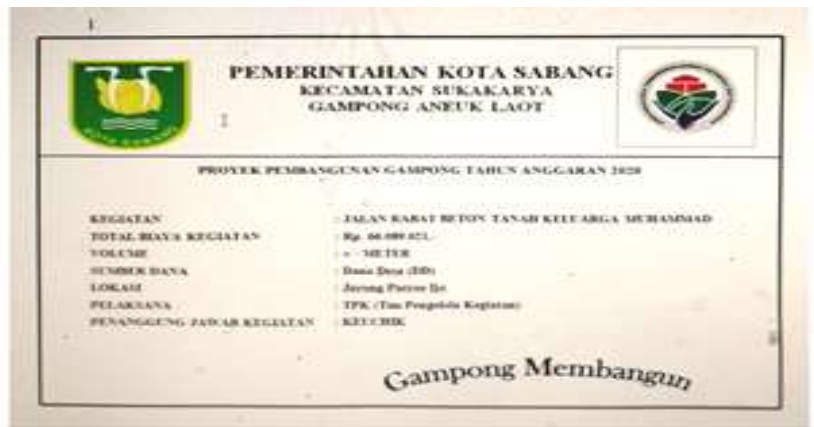
Pembangunan fisik yang telah dilakukan oleh pemerintah desa Aneuk Laot pada garis besar dapat dikatakan efektif, hanya beberapa pembangunan saja yang selesai sedikit terlambat dari waktu yang ditentukan pada awal perencanaan kegiatan. Namun hal itu terjadi tanpa unsur sengaja dan masih dalam batas wajar. Walau demikian, pemerintah Desa Aneuk Laot selalu berupaya agar pembangunan cepat selesai di waktu yang telah ditentukan. Karena, semakin cepat selesai maka tujuan juga telah tercapai. Untuk penjelasan lebih jelas, peneliti telah mewawancarai bapak FA sebagai Tuhapeut gampong Aneuk Laot terkait ketepatan

waktu, beliau mengatakan : *“Untuk hal ketepatan waktu dalam memulai maupun berakhirnya kegiatan sudah dilakukan sesuai dengan yang direncanakan. Walaupun ada sedikit kendala tapi itu masih batas wajar terjadi dalam pembangunan fisik setiap desa”*(wawancara 25 okt 2022).

Ketepatan waktu dalam proses penyaluran dan penggunaan dana desa juga bisa tidak sesuai dengan rencana karena ada penyebab tertentu seperti cuaca, kurangnya tenaga kerja dan sebab lainnya. Pada Desa Aneuk Laot, penyaluran dana desa dapat dikatakan sudah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Namun pada saat pelaksanaannya ada beberapa pembangunan yang tidak sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Hal ini terjadi disebabkan oleh kondisi alam yang berubah-ubah, curah hujan yang lebat mempengaruhi ketepatan waktu dalam menyelesaikan program-program pembangunan. Selain cuaca yang berubah-ubah, kurangnya jumlah tenaga kerja yang ikut terlibat dalam proyek pembangunan fisik di desa seperti pembuatan jalan. Hal ini salah satunya dikarenakan di masa pandemi terbatasnya sumber daya manusia untuk bekerja diluar rumah dan pihak pemerintah desa juga mengikis dana untuk mengupah tenaga kerja karena lebih mengfokuskan anggaran dana desa untuk yang terdampak wabah covid-19. Maka hal itu juga ikut menyebabkan keterlambatan selesainya pembangunan. Ketepatan waktu dalam pembangunan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Aneuk Laot dapat dibuktikan dengan kegiatan

proyek pembangunan. Adapun salah satu bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

**Gambar 4.2**  
**Proyek Pembangunan Gampong Tahun Anggaran 2020**



*Sumber : Kantor desa Aneuk Laot*

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa target pelaksanaan kegiatan dilakukan pada tanggal 20 februari dan selesai pada tanggal 15 maret. Namun, dalam pelaksanaannya justru selesai sedikit terlambat dari waktu yang telah direncanakan hal ini disebabkan karena pengaruh cuaca buruk maka kegiatan sempat tertunda maka tidak selesai tepat waktu seperti yang direncanakan. Terkait keterangan dari gambar di atas, peneliti juga mendapat informasi dari hasil wawancara tentang ketepatan waktu. Adapun hasil wawancara dengan bapak RZ selaku Bendahara kantor Desa Aneuk Laot, beliau mengatakan: *“Ada beberapa pembangunan yang sedikit telat*

*selesai pengerjaannya yang tidak sesuai dengan rencana awal. Tapi itu masih batas wajar karena disebabkan cuaca yang sering hujan dan adanya wabah virus covid juga menjadi penyebab lambatnya selesai pembangunan” (wawancara 24 okt 2022).*

Pada dasarnya ketepatan waktu merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur efektifitas pengalokasian Dana Desa. Dimana pengalokasian Dana Desa dapat dikatakan efektif apabila dapat tersalurkan sesuai dengan rencana baik dari segi waktu maupun program-program yang akan dilakukan. Pada desa Aneuk Laot, secara keseluruhan ketepatan waktu dalam pembangunan dan pengalokasian Dana Desa sudah dapat dikatakan sesuai atau tepat waktu. Namun, ada beberapa kendala karena faktor alam seperti cuaca dan faktor tenaga kerja. Karena pada dasarnya tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam proses pembangunan seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Edwien Kambey (2017) Hasil penelitian menjelaskan bahwa pada efektifitas ketepatan waktu untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan jalan di desa Karegesan belum optimal karena tidak adanya efisiensi penggunaan tenaga kerja sehingga sebaiknya setiap pekerjaan dibuatkan rencana kerja agar warga turut serta dalam mengadakan pengawasan dan tidak membiarkan kegiatan terabaikan.

### 3. Sesuai Manfaat.

Yang dimaksud dengan Sesuai Manfaat disini adalah pengalokasian dana desa dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa sebagai penerima program-program dana desa. Hal ini dapat dilihat dari pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat jadi diharapkan masyarakat dapat merasakan langsung manfaatnya. Adapun yang dimaksud dengan manfaat adalah manfaat yang dirasakan secara langsung maupun manfaat tidak langsung. Dimana manfaat langsung adalah manfaat yang diterima sebagai akibat adanya proyek, seperti naiknya nilai hasil produksi barang atau jasa, perubahan bentuk, turunnya biaya, dan lain-lain. Kenaikan nilai hasil produksi dapat disebabkan karena meningkatnya jumlah produk dan kualitas dari produk sebagai akibat adanya proyek. Misal: turunnya biaya pengangkutan karena perbaikan jalan, dan membaiknya job description di antara tenaga kerja karena perbaikan cara kerja.

Manfaat tidak langsung adalah Manfaat yang timbul sebagai dampak yang bersifat multiplier effects dari proyek yang dibangun terhadap kegiatan pembangunan lainnya. Contoh: perbaikan jalan menyebabkan timbulnya berbagai kegiatan masyarakat dalam memanfaatkan potensi ekonomi di sepanjang jalan yang dibangun. ( mangkoesobroto, 1998).

Pihak pemerintah Desa Aneuk Laot sudah berupaya melakukan pembangunan sebaik mungkin agar tujuan untuk

mensejahterakan masyarakat desa dapat tercapai dan manfaatnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama kebutuhan yang urgent. Kebutuhan yang urgent atau sangat penting lebih diutamakan seperti pembangunan kamar mandi, pembuatan selokan/saluran pembuangan air. Ini juga salah satu cara agar mengurangi masalah lain yang akan timbul. Untuk mengetahui kesesuaian manfaat dari hasil pembangunan yang dilakukan pemerintah desa, peneliti mewawancarai salah satu masyarakat, yaitu bapak MD yang mengatakan: *“Ada beberapa sektor pembangunan fisik yang sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Contohnya perbaikan masjid, jadi masyarakat semakin nyaman beribadah. Pembuatan kamar mandi di rumah warga yang belum memiliki kamar mandi, itu sangat penting dan sangat membantu. Pembuatan dan perbaikan saluran pembuangan air/got juga sangat penting dan bermanfaat untuk masyarakat sehingga dapat menghindari resiko banjir pada saat musim hujan lebat”* (wawancara 25 okt 2022).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat kita simpulkan bahwa masyarakat sudah dapat merasakan manfaat dari pembangunan fisik ini secara langsung. Begitu pun dengan ibu MS, dimana beliau mengatakan: *“Masyarakat sudah merasakan manfaat dari semua pembangunan yang telah dilakukan. Contohnya jalan paving blok menuju Tempat Pemakaman Umum (TPU) itu sangat memudahkan akses peziarah. Dan banyak*

*pembangunan lain yang memang sangat bermanfaat untuk masyarakat” (wawancara 25 okt 2022).*

Adapun manfaat tidak langsung juga dapat dirasakan oleh masyarakat desa. Dimana setelah beberapa bulan setelah pembangunan jalan selesai dibangun, masyarakat mulai mendirikan kios-kios kecil di jalan tersebut. Hal ini juga akan berdampak pada meningkatnya pendapatan masyarakat. Jadi dapat dikatakan bahwa sudah sesuai dengan indikator untuk mengukur efektifitas. Pengalokasian dana desa untuk pembangunan fisik dapat dikatakan efektif apabila masyarakat sudah merasakan manfaatnya. Pemerintah desa selalu berupaya mengutamakan kebutuhan masyarakat yang lebih penting, dengan demikian manfaat yang didapat juga sesuai. Dalam hal ini, pemerintah selalu berusaha agar pembangunan dilakukan dengan baik dan tepat sasaran agar tujuan untuk kesejahteraan masyarakat tercapai. Dengan pembangunan selesai diwaktu yang tepat sebagaimana sesuai dengan yang telah direncanakan, maka masyarakat juga semakin cepat merasakan manfaatnya.

Alokasi Dana Desa juga memberikan pengaruh yang baik terhadap pembangunan di Desa Sumberrejo, dimana pembangunan dibagi menjadi dua yaitu pembangunan fisik dan pembangunan masyarakat pedesaan. Pembangunan yang dilakukan sesuai kebutuhan masyarakat maka dari itu manfaat dari kegiatan juga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa Sumberrejo. Selain itu, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi



pelaksanaan Alokasi Dana Desa, antara lain sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, budaya gotong-royong, besaran Alokasi Dana Desa, serta kebijakan pemerintah. (Friska Kusuma, 2017).

Semakin tepat sasaran pengalokasian dana desa maka tercapainya kesejahteraan masyarakat juga semakin dekat. Dan begitu juga dengan pendapat menurut Mangkoesoebroto, dkk, manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat tidak hanya manfaat langsung akibat dari pembangunan proyek saja namun ada juga manfaat tidak langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat yang juga dapat mensejahterakan, misalnya dari bidang ekonomi. Pembangunan fisik yang sudah sangat dirasakan oleh masyarakat di Desa Aneuk laot seperti pembangunan jalan paving blok. Hal ini memudahkan akses masyarakat menuju ke tempat-tempat tertentu seperti Tempat Pemakaman Umum (TPU) , ke tempat-tempat wisata dan ke rumah ibadah(Masjid).

#### 4. Hasil sesuai dengan harapan masyarakat.

Hasil yang diharapkan oleh lapisan masyarakat juga menjadi salah satu indikator untuk mengukur efektifitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Aneuk Laot. Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pemerintah desa tentang bagaimana harapan pemerintah desa terkait dengan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan fisik Desa Aneuk Laot, hasil wawancara dengan bapak AR sebagai kepala Desa Aneuk laot. Beliau mengatakan: "*Selaku pemerintah desa kami selalu*

*mengharapkan semua sesuai rencana dan berjalan dengan lancar. Karena tujuan kami hanya untuk kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat. Jadi kami berupaya melakukan pembangunan yang sangat dibutuhkan dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat desa Aneuk Laot”. Dan untuk menunjang pernyataan bapak kepala desa di atas, peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat desa terkait apakah hasil sudah sesuai harapan masyarakat tentang Alokasi Dana Desa? Dan hasil wawancara dengan ibu MS, beliau mengatakan: “Iya, meskipun banyak kendala pada awal mulai kegiatan pembangunan, tapi melihat hasilnya memang sudah sesuai dengan harapan kami sebagai masyarakat desa Aneuk Laot. Walaupun ada lebih kurangnya tapi masih dalam batas wajar”.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pemerintah desa dan juga masyarakat, peneliti menyimpulkan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa memang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan tercapainya tujuan itu maka masyarakat juga merasakan bahwa hasil pembangunan sesuai dengan harapan mereka. Masyarakat di Desa Aneuk Laot juga mengharapkan apa yang direncanakan oleh pihak pemerintah desa benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik, agar segala tujuan dapat tercapai dan memberi manfaat untuk seluruh masyarakat desa.

Pengelolaan alokasi dana desa dapat dikatakan sudah efektif apabila semua perencanaan dan pelaksanaannya sudah berjalan

dengan baik dan lancar. Jika perencanaan sudah matang dan pelaksanaan juga sudah berjalan baik, maka hasil yang didapat juga akan baik. Pihak pemerintah selalu berupaya mengoptimalkan pembangunan agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan masyarakat yang ada di Desa Aneuk Laot. Segala upaya telah dilakukan dalam pembangunan desa terutama pembangunan fisik. walaupun ada beberapa pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan terkait ketepatan waktu, namun hal tersebut tidak mempengaruhi hasil dari pembangunan yang dilakukan karena masyarakat tetap merasakan manfaat dan sesuai dengan harapan mereka selama ini.

#### **4.4 Kendala yang menghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk Pembangunan Fisik Kota Sabang (studi pada Desa Aneuk Laot Kecamatan Sukakarya).**

Ada beberapa kendala yang menghambat pemerintah Desa Aneuk Laot dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik dapat diidentifikasi melalui hasil wawancara langsung dengan pemerintah Desa Aneuk Laot sebagai instansi yang bertugas sebagai pelaksana pengelolaan Alokasi Dana Desa, sampai pada tahap evaluasi dan pelaporan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Aneuk Laot.

Baik Pemerintah Desa Aneuk Laot maupun masyarakat desa mengemukakan berbagai faktor yang menjadi penghambat yang dihadapi pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa

dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Aneuk Laot adalah sebagai berikut :

#### 1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia yang dimaksud disini baik berkaitan dengan jumlah anggota pemerintah desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa, secara lebih khusus kemampuan Kepala Desa dan Bendahara Desa dalam mengelola alokasi dana desa yang diperoleh dari APB desa. Adapun terkait tingkat SDM yang rendah pada lapisan masyarakat di Desa Aneuk Laot maupun dalam pihak pemerintah desa. Jadi peneliti melakukan wawancara dengan salah satu anggota Tuhapeut yaitu bapak FA dan hasil wawancaranya sebagai berikut:

*“Kualitas Sumber Daya Manusia yang masih rendah di pemerintah Desa Aneuk Laot sangat berpengaruh dengan perencanaan yang akan dilaksanakan sehingga diperlukan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di aparatur pemerintah desa agar aparatur pemerintah desa dapat meningkatkan keahlian dibidang masing-masing sesuai dengan ilmu pengetahuan yang aparatur desa miliki khususnya dibidang Pembangunan Fisik”*(wawancara 24 okt 2022).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, bahwa faktor penghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik Di Desa Aneuk Laot ini yaitu Sumber daya manusia yang masih sangat terbatas, dimana kondisi Sumber Daya Manusia Pelaksana Pengelolaan Alokasi Dana Desa

yang ada masih sangat terbatas dan belum sesuai dengan standar kompetensi, baik dari kualitas pendidikan ataupun pengalaman kerja yang dimiliki perangkat Desa Aneuk Laot.

Namun, tidak hanya dalam pemerintah desa saja. Rendahnya kualitas SDM pada masyarakat usia produktif juga menjadi salah satu penyebab terhambatnya pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Aneuk Laot ini. Hal ini didukung oleh pernyataan dari salah satu masyarakat melalui wawancara dengan peneliti. Bapak MD mengatakan :

*“sebenarnya banyak usia muda dan produktif dalam masyarakat Desa Aneuk Laot ini. Tetapi kurangnya sosialisasi juga menjadi penyebab kualitas sdm yang menurun bahkan bisa dikatakan sangat rendah. Jadi sulit untuk berpartisipasi dalam kegiatan desa”.*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, bahwa faktor penghambat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik Di Desa Aneuk Laot ini yaitu Sumber daya manusia yang masih sangat terbatas, dimana kondisi Sumber Daya Manusia Pelaksana Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Aneuk Laot masih sangat terbatas dan belum sesuai dengan standar kompetensi, baik dari kualitas pendidikan ataupun pengalaman kerja yang dimiliki perangkat Desa Aneuk Laot. Tidak hanya perangkat desa saja, namun juga banyaknya masyarakat yang kurang produktif dan tidak mau berpartisipasi

pada kegiatan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan.

Hal ini dapat dilihat dari kurangnya kerjasama antara pihak pemerintah desa dengan anggota masyarakat desa Aneuk Laot. Padahal jika melihat jumlah masyarakat dalam usia produktif sangatlah banyak, akan tetapi minat masyarakat untuk berticipasi yang rendah menjadi salah satu sebab kurangnya sumber daya manusia pada kegiatan Alokasi Dana Desa ini.

## 2. Informasi

Informasi merupakan keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi. Informasi sangat dibutuhkan orang untuk menambah wawasan, memperbarui pengetahuan, dan sebagai bahan beropini. Bahkan, tak jarang informasi digunakan sebagai bahan dasar dalam membuat keputusan. Saat ini, telah banyak ditemukan media, baik cetak maupun online, yang semakin beragam dalam memberikan informasi.

Adapun informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa terkait Pengelolaan Alokasi Dana Desa masih kurang jelas. Selain tidak pernah melakukan sosialisasi sebelumnya, dalam tahapan musrembang desa pemerintah desa juga hanya sekedar menyebutkan nominal Alokasi Dana Desa yang diperoleh. Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait dengan tujuan Pengelolaan

Alokasi Dana Desa, bagaimana penggunaan anggaran tersebut, atau bagaimana peran masyarakat dalam setiap tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut.

Selain itu, Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan melalui proses sosialisasi. Informasi yang diperoleh melalui sosialisai yang diadakan pemerintah Desa Aneuk Laot dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa belum cukup baik. Terkait pernyataan tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat desa Aneuk Laot. Adapun hasil wawancara dengan bapak MD terkait informasi tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

*“Memang pihak pemerintah desa Aneuk Laot sudah berupaya memberikan informasi tentang Alokasi Dana Desa tetapi belum cukup baik karena belum transparan. Pihak pemerintah desa hanya menyebutkan jumlah keseluruhan tidak secara detail kemana saja dan untuk apa saja pengalokasian Dan Desa ini” (wawancara 25 okt 2022).*

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat dari Pemerintah Desa sehingga masyarakat tidak mengetahui sama sekali fungsi mereka sebagai tim pengawas langsung dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, melainkan masyarakat hanya mengetahui bahwa ada dan sudah telaksananya pembangunan yang ada di desa.

Dari hasil penelitian salah satu faktor penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat dari Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga

masyarakat tidak mengetahui sama sekali fungsi mereka sebagai tim pengawas langsung dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa, melainkan masyarakat hanya mengetahui bahwa ada dan sudah telaksananya pembangunan yang ada di Desa.

Informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa terkait Pengelolaan Alokasi Dana Desa masih kurang jelas. Selain tidak pernah melakukan sosialisasi sebelumnya, dalam tahapan musrembang desa pemerintah desa juga hanya sekedar menyebutkan nominal Alokasi dana Desa yang diperoleh. Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait dengan tujuan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, bagaimana penggunaan anggaran tersebut, atau bagaimana peran masyarakat dalam setiap tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut.

### 3. Partisipasi Masyarakat

Peran partisipasi masyarakat terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat, karena masyarakat merupakan bagian dari anggota Pemerintahan Desa. Oleh karena itu, sebagai Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa beserta aparatur desa perlu menyadari bahwa dalam pengelolaan alokasi dana desa dibutuhkan partisipasi masyarakat agar pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa dapat dialokasikan sesuai yang di rencanakan seperti, pembangunan jalan paving blok untuk akses tertentu, pembangunan saluran pembuangan/got, dan pembangunan kamar mandi untuk beberapa rumah yang belum ada.



Namun yang terjadi Di Desa Aneuk Laot kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa, hal ini ditunjukkan dengan sedikitnya jumlah masyarakat yang hadir maupun yang menyampaikan aspirasi/pendapat terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan. Dengan adanya pernyataan tersebut peneliti juga melakukan wawancara terhadap salah satu tokoh masyarakat desa Aneuk Laot untuk memperoleh informasi terkait bagaimana partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa. Berikut informasi yang diperoleh dari pernyataan bapak RS sebagai tokoh masyarakat.

*“Sebenarnya banyak masyarakat yang hadir pada acara musrembang. Apalagi kegiatan itu diadakan pada setiap jurong jadi masyarakat masing-masing jurong sudah memberikan ide atau aspirasi mereka kepada kepala jurong nya. Namun, pada saat pelaksanaan kegiatan pembangunan juga banyak masyarakat yang enggan berpartisipasi karena merasa kurangnya transparansi pihak pemerintah terkait waktu pelaksanaan dan jumlah dana yang dikeluarkan padahal masyarakat juga ingin mengetahui secara detail akan hal itu”.*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, bahwa faktor penghambat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pemabnguna fisik Di Desa Aneuk Laot ini yaitu partisipasi masyarakat dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang ada Di Desa Aneuk Laot masih tergolong belum

maksimal, terbukti dari setiap tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa hampir tidak ada keterlibatan masyarakat.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik Di Desa Aneuk Laot, dilakukan dengan tiga proses tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban masih kurang baik, dimana terkait dengan masih kurangnya sosialisasi dalam setiap musrembang dan kurangnya transparansi dari pihak pemerintah desa. Sehingga mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat dikarenakan kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat desa, sehingga berdampak pada rendahnya partisipasi dan pengawasan dari masyarakat desa baik secara lembaga ataupun individu dalam setiap tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Kondisi tersebut berdampak pula belum efektifnya pencapaian tujuan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik Di Desa Aneuk Laot.

Hasil penelitian terkait rendahnya partisipasi masyarakat dan pengawasan oleh masyarakat seperti tersebut diatas, juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Okta Rosalinda (2016). Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Segodorejo dan Desa Plosa Kerep Kecamatan Smobito Kabupaten Jombang belum efektif, beberapa kendala ditemui seperti kurangnya partisipasi masyarakat, serta tidak adanya pengawasan dari lembaga masyarakat utamanya BPD

Sogodorejo sebagai lembaga desa yang bertugas untuk mengawasi kinerja pemerintah desa.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait efektifitas pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk Pembangunan Fisik Kota Sabang ( desa Aneuk Laot kecamatan Sukakarya) , maka dapat ditarik kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan fisik di desa Aneuk Laot sudah dapat dikatakan baik. Pembangunan fisik yang dibangun sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Dimana terdapat tiga(3) tahap dalam pengelolaan alokasi dana desa untuk pembangunan fisik yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil penelitian, pada tahap perencanaan dapat dilihat dari diadakannya musrembang oleh pihak pemerintah desa Aneuk Laot dan jumlah masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini juga sudah memenuhi ketentuan yang diharapkan. Tahapan pelaksanaan, berdasakan hasil penelitian pada tahapan pelaksanaan dalam pengalokasian dana desa untuk pembangunan fisik sudah cukup jelas. Hal ini dapat dilihat dari dilibatkannya masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan juga sudah sesuai dengan perencanaan yang telah dirancang

pada tahap sebelumnya. Pada tahapan pertanggungjawaban dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Aneuk Laot dapat dikatakan kurang efektif. Kurangnya transparansi terkait laporan pertanggungjawaban dari pihak pemerintah desa kepada masyarakat desa Aneuk laot. Hal ini bertolak belakang dengan prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa yang mengutamakan transparansi kepada masyarakat.

2. Efektifitas pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk Pembangunan fisik di desa Aneuk Laot kecamatan Sukakarya ini sudah dapat dikatakan efektif. Hal ini dapat dilihat dari tercapainya indikator-indikator untuk mengukur efektifitas yaitu pencapaian tujuan, ketepatan waktu, sesuai manfaat, dan hasil sesuai dengan harapan masyarakat.
3. Terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan fisik di desa Aneuk Laot kecamatan Sukakarya, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), informasi, partisipasi masyarakat.

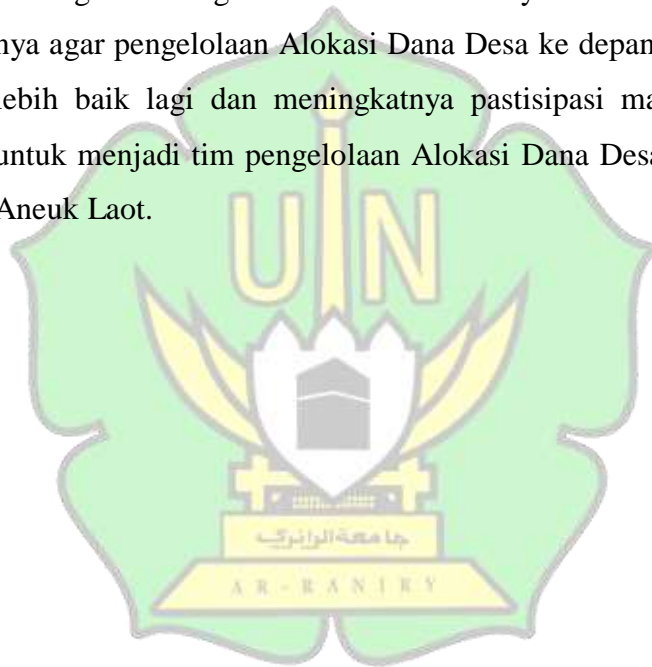
## **5.2 Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka beberapa saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Sebagai pemerintah desa Aneuk Laot, dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap pertanggungjawaban seharusnya melibatkan seluruh elemen

masyarakat dan lebih transparansi terkait anggaran yang masuk dan yang dikeluarkan kepada masyarakat desa selaku salah satu tim evaluasi di desa Aneuk Laot. Juga pihak pemerintah desa harus memberi informasi yang jelas kepada masyarakat.

2. Kepada pemerintah desa Aneuk Laot, diharapkan dapat meningkatkan lagi kualitas Sumber Daya Manusia(SDM) nya agar pengelolaan Alokasi Dana Desa ke depannya juga lebih baik lagi dan meningkatnya partisipasi masyarakat untuk menjadi tim pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Aneuk Laot.



## DAFTAR PUSTAKA

- Chandra, (2018). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa(studi pada desa Wonorejo kecamatan singosari kabupaten Malang)*
- Noviyanti, (2017). *Analisis penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya meningkatkan pembangunan desa (studi kasus pada desa Suwan kecamatan Kalawat kabupaten Minahasa utara)*
- Deti Kemalasar, (2016). *Transparansi dan Akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.*
- Nova Sulastri (2016). *Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan fisik desa Lakapodo kecamatan watopute kabupaten Muna.*
- Agustin Amelyana,dkk. *Efektivitas Dana Pembangunan Fisik Desa Pucangro Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang.* jurnalAdministrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Ma.
- Arikunto, Suharsimi. (1993). *Manjemen.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Devas, dkk, 1989, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia,* (terjemahan, Masri Maris) penerbit UI, Jakarta.
- Danu Wisakti, *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Wilayah Kecamatan Geyer KabupatenGrobogan,* Magister Ilmu Administrasi Negara, UNDIP, 2008.

Haris, Dian Rasdianah, 2016. *Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Kendari*. Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Halu Oleo.

Hargono, DS. 2010. *Efektifitas Penyaluran Alokasi Dana Desa Pada Empat Desa di Kabupaten Karangasem Propinsi Bali*

[Http://www.Landasanteori.com/2015/07/](http://www.Landasanteori.com/2015/07/). *Pengertian Anggaran Menurut Definisi.html*. Diakses pada maret 2016..

Muntah anah, Siti. *Efektifitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas*. jurnal ekonomi.

<https://setkab.go.id/pemanfaatan-dana-desa-tahun-2021-dan-prioritas-pemanfaatan-dana-desa-tahun-2022/>.

Rahman, Albina A, 2015. *Sabang Dalam Lintasan Sejarah*. Sabang: Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Sabang.  
<https://disparbud-dev.sabangkota.go.id>





## LAMPIRAN

### 1. Dokumentasi Wawancara.

- a) Wawancara dengan pihak pemerintah Desa Aneuk Laot.



- b) Wawancara dengan masyarakat.



c) Wawancara dengan masyarakat.



2. Bukti-bukti Hasil Pembangunan.

a. Pembuatan jalan paving blok.



b. Pembuatan saluran pembuangan air/got.



## Riwayat Hidup

Nama : Maulidya Caisarina  
NIM : 180604082  
Tempat/Tgl. Lahir : Sabang 13 Juli 2000  
Status : Belum Menikah  
Alamat : Jln. T.Nyak Arief. Darussalam.  
No. Hp : 085362536412  
Email : 180604082@student.ar-raniry.ac.id

### Riwayat Pendidikan

1. SD : 2012
2. SMP : 2015
3. SMA : 2018
4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Ar-Raniry Banda Aceh

### Data Oorang Tua

Nama Ayah : Burhanuddin.  
Pekerjaan : PNS  
Nama Ibu : Yusmarita Bangun  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat Orang Tua : Desa Aneuk Loat, Kota Sabang.